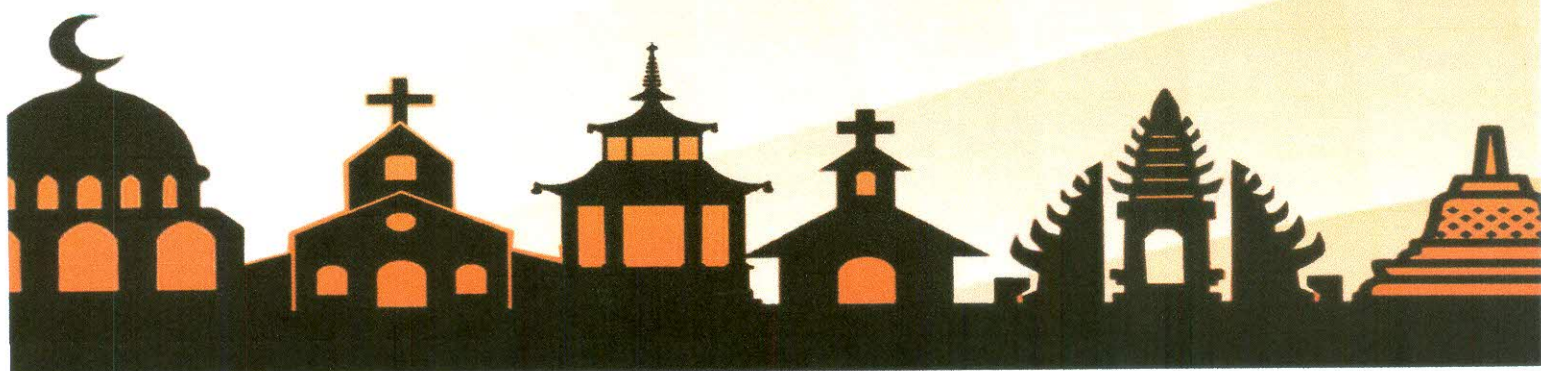




RENCANA STRATEGIS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020 - 2024**



Penandatanganan Renstra dan Penyerahan Renstra Kanwil Kemenag Sumbar 2020-2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat (Renstra Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat) tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat tahun 2020-2024 disusun mempedomani Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan Agama serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Renstra Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024 serta Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama tahun 2020-2024

Renstra ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, tujuan dan sasaran kegiatan serta target kinerja dan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian Renstra Kemenag mengacu pada 4 (empat) pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024.

Renstra Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat tahun 2020-2024 ini, diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja dalam periode lima tahun ke depan serta menjadi acuan dalam mendukung pencapaian program pemerintah di sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024 di Sumatera Barat

Padang 28 Agustus 2020
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

H. Hendri



H. Hendri, S.Ag, M.Pd



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 428a TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020 - 2024**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17 ayat (3);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun sebagai pedoman untuk :
1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
- KETIGA : Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

**H. HENDRI, S. Ag. M. Pd**
NIP. 196708011995031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 428a TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANWIL KEMENTERIAN AGAMA SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	4
1.1.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	4
1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	10
1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	11
1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten	12
1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	14
1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten	16
1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri	17
1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	20
1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	26
1.2 Potensi dan Permasalahan	28
1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	29
1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	30
1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	32
1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	34
1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	35
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	36
2.1 Tujuan	36
2.2 Sasaran	37
2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	51
2.4 Nilai Nilai Kementerian Agama	61
BAB III TARGET NINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	65
3.1 Target Kinerja	65
3.2 Kerangka Pendanaan	91
BAB IV PENUTUP	97
Lampiran I : Matrik Kinerja dan Pendanaan 9 Program	98
Lampiran II : Matrik Kinerja dan Pendanaan 4 Program	112
TIM PENYUSUN	vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Potren Prosentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah
Tabel 1.2	Persentase Peran Rumag Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan
Tabel 1.3	Jumlah Konflik Antar Umat Beragama Di Sumatera Barat 2015-2019
Tabel 1.4	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar
Tabel 1.5	Jumlah Penyuluh Agama di Sumatera Barat 2015-2019
Tabel 1.6	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi
Tabel 1.7	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dan Penduduk Sumatera Barat
Tabel 1.8	Prestasi KUA Kecamatan Sumatera Barat di Tingkat Nasional
Tabel 1.9	Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
Tabel 1.10	Jumlah Penghulu yang Berkompetensi
Tabel 1.11	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
Tabel 1.12	Perkembangan Jumlah Siswa RA/ Madrasah di Sumatera Barat 2015-2019
Tabel 1.13	Perkembangan Jumlah Santri di Sumatera Barat 2015-2019
Tabel 1.14	Jumlah Siswa/ Santri Penerima BOP dan BOS
Tabel 1.15	Jumlah Siswa/ Santri Penerima BSM/ PIP
Tabel 1.16	Data Kelulusan Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015-2019
Tabel 1.17	Target dan Capaian APK MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya Sumatera Barat 2015-2019
Tabel 1.18	Target dan Capaian APM MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya Sumatera Barat 2015-2019
Tabel 1.19	APK MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya Sumatera Barat 2015-2019
Tabel 1.20	Nilai Rata Rata Hasil UN MTs/ MA Sumatera Barat 2016-2019
Tabel 1.21	Nilai Rata Rata USBN Pendidikan Agama Islam
Tabel 1.22	Indeks Integritas Siswa Madrasah Sumatera Barat
Tabel 2.1	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Sumatera Barat Tahun 2020-2024
Tabel 3.1	Target Kinerja Kementerian Agama Sumatera Barat Sampai Tahun 2024
Tabel 3.2	Kebutuhan Pendanaan Kementerian Agama Sumatera Barat Tahun 2020 Berdasarkan 9 Program
Tabel 3.3	Kebutuhan Pendanaan Kementerian Agama Sumatera Barat 2021-2024 Berdasarkan 4 Program

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat 2015-2019
Grafik	1.2	Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri
Grafik	1.3	Jumlah Siswa/ Santri Penerima BOS
Grafik	1.4	Jumlah Siswa/ Santri Penerima BSM/ PIP
Grafik	1.5	Persentase APK MI, MTs dan MA Tahun 2015-2019
Grafik	1.6	Persentase APM MI, MTs dan MA Tahun 2015-2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Kegiatan Deklarasi Cinta Kerukunan Sumatera Barat
Gambar	1.2	Gedung Laboratorium Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat
Gambar	1.3	Gerak Jalan Kerukunan di Sumatera Barrat 2019
Gambar	1.4	Juara II Lomba LKTI Penghulu Tingkat Nasional
Gambar	1.5	Pelayanan Jemaah Calon Hajji di Asrama Haji Embarkasi Padang
Gambar	1.6	Pembangunan Revitalisasi Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman
Gambar	1.7	Penghargaan Embarkasi Terbaik Bidang Transportasi Pelayanan Haji 2018



BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2019. Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kementerian Agama terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir dan berbagai pertemuan, diskusi dan Focuss Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum dari Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada periode pembangunan sebelum 2015-2019. Program program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Berdasarkan visi tersebut, maka pada periode Renstra Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu : **taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera**.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi



sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (problem solving).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya.

Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 7 (tujuh) misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;



4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sarannya masing-masing berikut indikator, guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya menyelaraskan dan mempertajam tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama, berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : B-3392/SJ/B.I.1/OT.01.2/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan;



5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut :

1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama diukur melalui indikator :

1. Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku, dan
2. Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Prosentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 : Prosentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah

Jumlah Penduduk dan Keaktifan pada Rumah Ibadah	Berdasarkan Agama							Total
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Lainnya	
Jumlah penduduk	5.389.314	79.838	46.059	95	3.659	8	272	5.519.245
Jumlah yang aktif pada Rumah Ibadah	3.772.545	32.589	32.241	60	2.500	-	-	3.839.935
Prosentase	70,00	40,82	70,00	63,16	68,32	-	-	69,57

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2019

Tabel 1.2 : Prosentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan

Rumah Ibadah yang menegenggarakan Kegiatan Sosial Keagamaan	Berdasarkan Agama						Total
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu	
Jumlah tempat ibadah	13.810	77	72	1	8	-	14.121
Jumlah rumah ibadah yang melakukan kegiatan sosial	10.151	77	30	1	8	-	10.370
Prosentase	73,50	100	41,67	100,00	100,00	-	73,44

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2019

1.1.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya



pembangunan di Sumatera Barat serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kementerian Agama telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut 'aktor', karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, workshop, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti: (1) pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama, (2) peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, (3) pelatihan promosi kerukunan umat beragama, dan (4) penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam membingkai kerukunan antar umat beragama guna mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.

FKUB di Sumatera Barat yang sudah terbentuk di Tingkat Provinsi dan 17 Kabupaten/ Kota, menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama baik kerukunan antarumat beragama, kerukunan intern umat beragama, maupun kerukunan umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan). FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan kerukunan umat beragama. FKUB mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten/Kota).



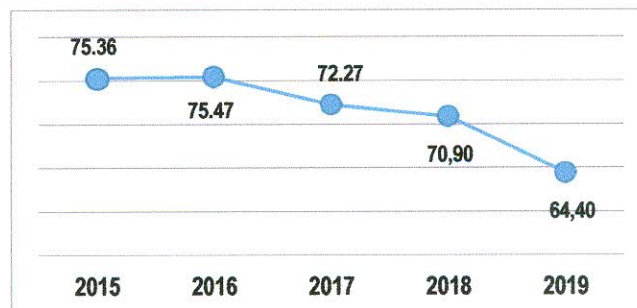
Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas Kerukunan Umat Bergama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa :

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) Provinsi. Indeks KUB adalah survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Sumatera Barat, mencakup tiga dimensi, yaitu : a) toleransi; b). kesetaraan, c). Kerja sama.
2. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama.

Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah terkait tentang peta Indeks KUB di Sumatera Barat. Dan menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Capaian indeks KUB Tahun 2015 – 2019 Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1.1 : Indeks KUB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Capaian Indeks KUB cenderung menurun di tahun 2015 menuju 2019 dan perbandingan di tahun 2015 dengan tahun 2019 turun sebesar 11,36%. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat, cenderung mengalami penurunan namun masih di dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan kondisi Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat berjalan dinamis. Indikator kedua adalah



penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Sumatera Barat. Konflik yang terjadi pada umumnya dipicu adanya kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman. Kanwil Kementerian Agama selalu hadir pada setiap konflik yang terjadi untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian. Jumlah konflik antar umat beragama yang pernah terjadi di Sumatera Barat kurun waktu 2015-2019 sebanyak 4 (empat) peristiwa

Tabel 1.3 : Jumlah Konflik Antar Umat Beragama Di Sumatera Barat 2015-2019

Peristiwa Konflik dan Penyelesaiannya	Tahun					Total
	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah konflik yang terjadi	-	1	-	-	3	4
Jumlah konflik yang terselesaikan	-	1	-	-	3	4
Prosentase Penyelesaian	-	100	-	-	100	100

Sumber : FKUB Sumatera Barat

Atas peristiwa konflik yang terjadi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat bersama FKUB Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah, sudah menyelesaikan sejumlah konflik yang terjadi. Pada Tahun 2016, kasus kremasi tenaga Himpunan Tercinta Teman (HTT) dengan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) yang terjadi di lokasi kremasi dari jalan Pasar Borong ke Gunung Padang dan Bungus Kota Padang. Pada tahun 2019 terjadi 3 konflik. **Pertama**, penggunaan tempat perayaan natal di hotel PUSAKO Bukittinggi bagi Jemaat Gereja Betel Indonesia di Bukittinggi. Pihak hotel berpegang pada surat Kesbangpol atas nama Walikota Bukittinggi bernomor 07/KL-TU/II/2008 tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban yang salah satu poinnya tidak memanfaatkan hotel sebagai tempat pelaksanaan ibadah salah satu agama atau aliran baik rutin maupun insidentif. **Kedua**, penggunaan rumah penduduk tempat ibadah dan perayaan natal di Jorong Sungai Tambang Nagari Kunanga Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan **Ketiga**, penggunaan rumah penduduk untuk kegiatan ibadah dan perayaan natal di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya Desa/Nagari Sadar Kerukunan. Sampai Tahun 2019 jumlah Desa/ Nagari Sadar Kerukunan yang telah terbentuk 4 (empat) Desa/ Nagari sebagai berikut :

1. Kampung Maha Karya Desa/Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
2. Desa/Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;



3. Desa Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
4. Desa Sikabau Kecamatan Pulau Pujung Kabupaten Dharmasraya

Gambar 1.1 : Kegiatan Deklarasi Cinta Kerukunan Sumatera Barat



Disamping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah disebar 3.000 lembar pamflet dan pemasangan baliho untuk menunjang kerukunan. Selain itu, telah dilibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar. Tahun 2017 digagas kegiatan **Deklarasi Cinta Kerukunan**. Deklarasi yang dilakukan pada Minggu, 2 April 2017 dan dicatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Deklarasi Cinta Kerukunan yang dihadiri Menteri Agama dan Tokoh Lintas Agama Sumatera Barat serta 1500 perwakilan umat beragama lintas agama. Plakat Rekor MURI diberikan oleh pihak MURI kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Salman, di Jakarta Jumat (12/05 2017)

Pada Tahun 2018 didirikanlah Laboratorium Kerukunan Umat Bergama di Sumatera Barat, diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Laboratorium ini berada di Gedung FKUB Sumatera Barat sekaligus menjadi ruang rapat FKUB. Laboratorium ini merupakan satu satunya yang ada di Indonesia



Gambar 1.2 : Gedung Laboratorium Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat



Kampanye Damai dalam bentuk Gerak Jalan Kerukunan juga terus dilakukan setiap tahunnya, sampai tahun 2019 telah dilakukan sebanyak 8 kali.

Gambar 1.3 : Gerak Jalan Kerukunan di Sumatera Barat 2019



Kerukunan Umat Beragama, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.



Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Sumatera Barat, adalah fakta masyarakatnya yang multi etnis. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”

Multikultural sendiri menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama di Sumatera Barat

Kegiatan mendukung moderasi beragama yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 17 kali dengan jumlah peserta 2.200 orang. Dialog moderasi beragama sebanyak 21 kali dengan jumlah peserta sebanyak 610 orang, dialog tokoh agama sebanyak 6 kali dengan jumlah peserta sebanyak 220 orang, yang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-religi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengkordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah Negara kepada Kementerian Agama, tak terkecuali Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi vertikalnya. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Sumatera Barat ditandai dengan beberapa indikator, yaitu :

1. Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar;



2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi,
3. Jumlah KUA yang memenuhi standar,
4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi, dan
5. Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi.

1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/ rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib.

Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 13.850 Masjid/ Mushola, 230 Gereja Kristen/ Rumah Kebaktian, 72 Gereja Katolik/ Paroki/ Stasi/ Kapel, 1 Pura, 10 Rumah Ibadah Buddha (Vihara, Cetiya, Kelenteng), serta 1 Kelenteng/Konghucu. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama selama kurun waktu 2015 - 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.4 : Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar

Berdasarkan Agama	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	13.500	13.560	13.610	13.700	13.810
Kristen	43	54	66	72	77
Katolik	13	13	14	15	19



Berdasarkan Agama	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hindu	1	1	1	1	1
Buddha	8	8	8	8	8
Khonghucu					
Jumlah	13.565	13.636	13.699	13.796	13.915

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan jumlah penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja penyuluh agama. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatori SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

- Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.
- Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.



- Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.5 : Jumlah Penyuluh Agama di Sumatera Barat 2015-2019

Penyuluh Agama	2015			2016			2017			2018			2019		
	PNS	Non PNS	Jml	PNS	Non PNS	Jml	PNS	Non PNS	Jml	PNS	Non PNS	Jml	PNS	Non PNS	Jml
1 Islam	115	3.180	3.295	332	3.180	3.512	332	1.400	1.732	326	1.418	1.744	324	1.418	1.742
2 Kristen	-	50	50	-	80	80	-	45	45	-	27	45	-	50	50
3 Katolik	1	50	51	1	30	31	1	30	31	1	30	31	1	61	61
4 Hindu	-	5	5	-	5	5	-	4	4	-	5	5	-	5	5
5 Buddha	-	16	16	-	18	18	-	20	20	-	20	20	-	20	20
Jumlah	116	3.301	3.417	333	3.313	3.646	333	1.499	1.832	327	1.500	1.845	325	1554	1.878

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Tabel 1.6 : Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

Penyuluh Agama	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	122	341	608	949	1.126
Kristen	50	80	45	27	50
Katolik	50	30	30	30	61
Hindu	5	4	4	4	4
Buddha	16	18	20	20	20
Total	243	473	707	1.030	1.261
Perbandingan	7,11	12,97	38,59	55,83	67,15

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Dari 1.878 orang jumlah penyuluh agama yang ada (PNS dan Non PNS) yang memenuhi kompetensi sebanyak 1.261 orang (67,14%) yang belum memiliki kompetensi menjadi target kinerja dalam Renstra 2020-2024

Tabel 1.7 : Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dan Penduduk Sumatera Barat

Keterangan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama							Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Lainnya	
Penduduk	5.389.314	79.838	46.059	95	3.659	8	272	5.519.245
Penyuluh Agama	1.742	80	62	5	20	-	-	1.999
Rasio	1 : 2.942	1 : 998	1 : 743	1:19	1 : 183	-	-	1 : 2.761

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani, dimana untuk 1 orang penyuluh agama harus melayani rata-rata sebanyak 2.761 umat beragama. Kondisi ini mendorong Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.



1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Berbagai aksi kegiatan yang dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas layanan pada KUA Kecamatan, diantaranya :

1. Deklarasi Integritas Layanan KUA. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan maklumat layanan serta penandatanganan Pakta Integritas oleh semua Kepala KUA beserta Penghulu dan staf KUA Kecamatan
2. Penguatan Zona Integritas pada KUA Kecamatan;
3. Penilaian KUA Percontohan/ Teladan;
4. Pembinaan SDM Kepenghulu;
5. Kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah
6. Supervisi, monitoring dan evaluasi administrasi layanan nikah;
7. Focus Group Discussion (FGD) dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA

Dari berbagai upaya kegiatan yang dilakukan tersebut, memperoleh hasil yang baik, dengan indikator sebagai berikut:

1. Tidak adanya aduan masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
2. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di semua KUA Kecamatan;



3. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
4. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
5. Kutipan akta nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah dan layanan legalisasi serta duplikat buku nikahnya tidak dipungut biaya

Survei Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA yang dilakukan pada 73 KUA Kecamatan di 18 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, menunjukkan prosentase angka kepuasan layanan sebesar 77,54. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 9 komponen, yaitu : produk spesifikasi, biaya tarif, waktu, sarana dan prasarana, persyaratan, sistem dan mekanis me, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan.

Nilai 77,54 tersebut menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA secara keseluruhan sudah baik. Namun demikian masih ada beberapa komponen yang dianggap belum sempurna, yaitu: sarana prasarana dengan rata rata nilai 62,1, yang mencakup: luas area parkir, tersedianya kotak saran atau bentuk lainnya, kebersihan toilet, dan kenyamanan ruang tunggu yang belum memenuhi standar pelayanan. Hasil penilaian KUA Teladan tingkat nasional yang dalam kurun waktu 2015-2019 utusan Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 1.8 : Daftar Prestasi KUA Kecamatan Sumatera Barat di Tingkat Nasional

No	Tahun	Kepala KUA	Prestasi Tingkat Nasional
1	2015	H. Syafalmart, S.Ag (Kecamatan Baso Kabupaten Agam)	Harapan III
2	2016	H. Syafrijal, M.Ag (Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)	Harapan I

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Selama kurun waktu 2015-2019, Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.9 : Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal

Jumlah KUA	Tahun					Total
	2015	2016	2017	2018	2019	
Se Sumatera Barat	17	26	34	43	73	173

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019



1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Penghulu menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat.

Tugas Penghulu menurut KepMENPAN Nomor PER/62/ M.PAN/6/2005 pasal 4 adalah : 1) melaksanakan perencanaan kegiatan kepenghulu an; 2) pengawasan pencatatan NR; 3) pelaksanaan pelayanan NR; 4) pemeriksaan kesehatan dan konsultasi NR; 5) pemantauan pelanggaran ketentuan NR; 5) pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah; 7) pembinaan keluarga sakinah; dan 8) pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghulu an dan 9) pengembangan kepenghulu an. Sampai tahun 2019, jumlah penghulu di Sumatera Barat yang memenuhi kompetensinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.10 : Jumlah Penghulu yang Berkompetensi

Jumlah Penghulu	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Se Sumatera Barat	102	107	118	291	291

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Pada ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Penghulu Tingkat Nasional Tahun 2019 Taufik Zulfahmi, asal Kota Padang meraih Juara II

Gambar 1.4 : Juara II Lomba LKTI Penghulu Tingkat Nasional 2019

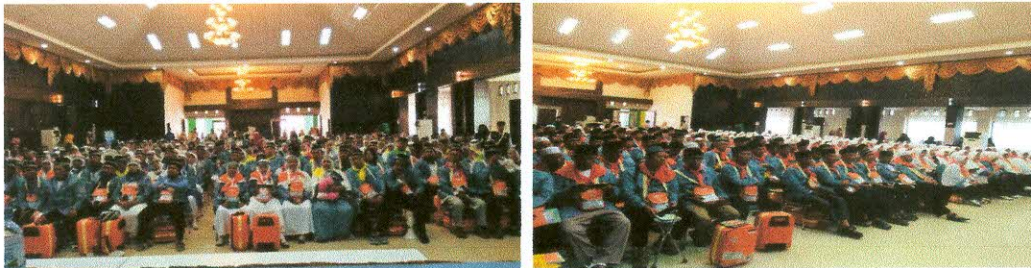




1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

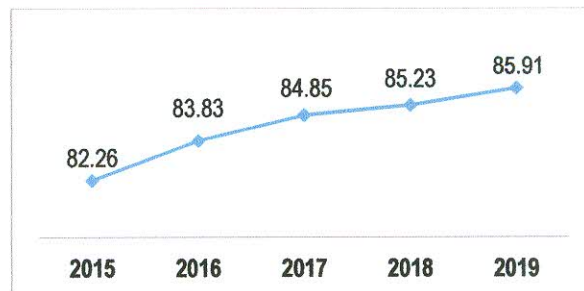
Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi/Debarkasi Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu diperlihara dan terus ditingkatkan.

Gambar 1.5 : Pelayanan Jemaah Calon Haji di Asrama Haji Embarkasi Padang



Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan jemaah haji selama berada di Asrama Haji Embarkasi/ Debarkasi Padang, mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dari grafik berikut :

Grafik 1.2 : Indeks Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri



Sumber : Badan Litbang dan Diklat / BPS

Berbagai upaya telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan layanan jemaah haji. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan melalui program sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji. Tujuan dari program ini dimaksudkan sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selama ini bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu



keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji tidak dapat maksimal

Beberapa inovasi pelayanan yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji di Sumatera Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Melakukan optimalisasi penyelesaian dokumen calon jemaah haji dengan sistem E-Visa. Tersedianya digitalisasi dokumen haji melalui MRTD, sehingga dapat terpangkasnya alur pengantaran dokumen calon jemaah haji berangkat tahun berjalan yang begitu panjang dan rumit, dengan optimalisasi penyelesaian dokumen calon jemaah haji dengan sistem E-Visa di Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu. Adapun alur yang ditempuh, pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat hanya melakukan Input data jemaah melalui MRTD (Machine Readable Travel Document) disertai pengelompokan data jemaah, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat hanya mengirim soft copy paspor, lembar pelunasan, vaksin meningitis kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama RI cq. Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler.
- Bupati/Walikota secara langsung mengantar keberangkatan dan menyambut kepulangan jemaah haji asal daerahnya di Asrama Haji Embarkasi Padang
- Menyambut kedatangan jemaah haji dari daerah dengan shalawat badar dan talbiyah.
- Menyemarakkan penyelenggaraan ibadah haji dengan spanduk-spanduk bernuansa haji yang di sepanjang rute yang dilewati jemaah haji.
- Menempatkan tempat duduk petugas kloter, secara menyebar pada setiap kloter.
- Panitia selama bertugas bagi yang laki-laki diharuskan memakai peci, baik peci nasional maupun peci haji.
- Menerbitkan buku panduan perjalanan ibadah haji kloter, buku ini sebagai pedoman bagi petugas dan jemaah dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan selama berada di Arab Saudi.
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas petugas kloter (TPHI dan TPIHI).
- Mengarahkan seluruh madrasah yang berada disepanjang jalan yang dilalui jemaah haji untuk ikut melepas keberangkatan jemaah haji dengan lambaian tangan.
- Air zamzam langsung diterima oleh jemaah haji setelah sampai di daerahnya.



- Petugas kloter dan TPHD diberi kalungan bunga, sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya.
- Memberikan piagam penghargaan kepada petugas Kloter dan TPHD.
- Mengadakan pertemuan ketua kloter dalam hal evaluasi terhadap hambatan yang dialami pada setiap kloter.
- Moderasi berhaji melalui penguatan manasik dengan penambahan materi sejarah haji;

Inovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dinas Kesehatan Provinsi, TNI dan POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Lembaga Keuangan (bank milik pemerintah dan swasta), Perusahaan Penerbangan, biro perjalanan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan Islam serta unsur masyarakat lainnya. Berkat kerja sama tersebut, terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan indikasi: (1) terurainya masalah pada asrama haji, hal ini dapat dilihat tidak adanya jemaah yang tidak berangkat kalau sudah masuk asrama haji; dan (2) membantu meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri.

Untuk meningkatkan kualitas layanan pemberangkatan jemaah haji, mulai tahun 2018 dilakukan Pembangunan Revitalisasi Asrama Haji Embarkasi Padang dengan anggaran Rp 48,498 Miliar. Digunakan untuk melanjutkan pembangunan satu unit gedung asrama empat lantai dengan luas tanah 84 x 18,5 meter. Gedung didesain untuk 70 kamar, masing-masing dengan tiga tempat tidur, meja, kursi, lemari, televisi plus pendingin ruangan.

Gambar 1.6 : Pembangunan Revitalisasi Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman



Tahun 2018 Embarkasi Haji Padang menerima penghargaan nasional sebagai embarkasi **terbaik bidang transportasi**. Penghargaan ini diberikan KPHI (Komisi Pengawas



Haji Indonesia) dan diterima langsung Kepala Kanwil Kemenag, H. Hendri di Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis. 6 Februari 2018. Ikut mendampingi Kakanwil Kepala UPT. Asrama Haji, Ali Amran dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), H. Afrijal.

Gambar 1.7 : Penghargaan Embarkasi Terbaik Bidang Transportasi Pelayanan Haji 2018



Penghargaan ini menjadi bukti terjalannya koordinasi yang baik antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan UPT Asrama Haji Padang dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta instansi terkait lainnya yang memiliki andil dalam menyukkseskan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.

1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama. Indikator dari sasaran tersebut antara lain :

1. APK RA;
2. APK MI/Ula;
3. APK MTs/Wustha;
4. APK MA/Ulya;
5. APM MI/Ula;
6. APM MTs/Wustha;
7. APM MA/Ulya.



Adapun data lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kanwil Kementerian Agama sebagai berikut :

Tabel 1.11 : Jumlah Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	RA	404	14.808
	MI	146	24.560
	MTs	405	95.722
	MA	218	36.613
2	Madrasah Diniyah Takmiliah Tingkat Ula	1.957	125.584
	Madrasah Diniyah Takmiliah Tingkat Wustha	64	6.170
	Madrasah Diniyah Ulya	-	-

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Perkembangan jumlah siswa pada pendidikan umum berciri khas agama di Sumatera Barat 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.12 : Perkembangan Jumlah Siswa RA/ Madrasah Tahun 2015-2019

No	Jenis Lembaga	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	RA	12.905	13.541	14.157	14.157	13.564
2	MI	17.911	21.570	21.515	21.515	23.135
3	MTs	83.548	85.560	84.933	84.933	93.496
4	MA	28.878	30.685	30.431	30.431	35.572
Jumlah		143.242	151.356	151.036	151.036	165.767

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Berdasarkan tabel 1.12 jumlah siswa RA, MI, MTs, MA, terlihat dari tahun ke tahun jumlah siswa selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang dikelola Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya. Sedangkan perkembangan jumlah santri pada pendidikan keagamaan di Sumatera Barat 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.13 : Perkembangan Jumlah Santri di Sumatera Barat 2015-2019

No	Jenis Lembaga	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ponpes Salafiyah Tingkat Ula	196	125	213	462	355
2	Ponpes Salafiyah Tingkat Wustha	2.001	1.547	1.454	1.639	3.542
Jumlah		2.197	1.672	1.667	2.101	3.897

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019



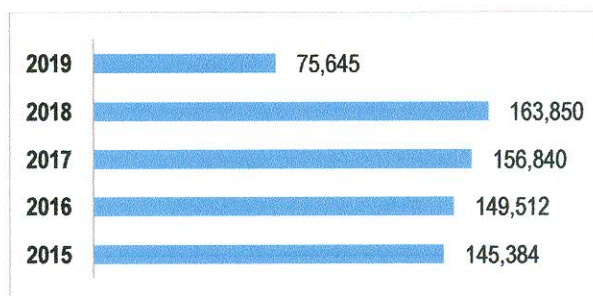
Data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang dikelola Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat semakin tinggi dan menjadai bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan telah menjadi pilihan bagi masyarakat. Upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang telah disalurkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTs, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya. Alokasi anggaran BOP bagi RA dan BOS dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.14 : Jumlah Siswa/ Santri Penerima BOP dan BOS Tahun 2015-2019

No	Lembaga Pendidikan	Jenis Bantuan	2015	2016	2017	2018	2019
			Siswa / Santri				
1	RA	BOP	12.864	14.151	13.562	14.469	14.082
2	MI	BOS	18.222	21.537	21.684	23.369	23.248
3	MTs	BOS	83.753	80.543	88.489	91.028	101.646
4	MA	BOS	28.801	31.464	31.438	32.883	32.772
8	Ponpes Salafiyah Tingkat Ula	BOS	1.053	270	213	462	355
9	Ponpes Salafiyah Tingkat Wustha	BOS	691	1.547	1.454	1.639	3.542

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Grafik 1.3 : Jumlah Siswa/ Santri Madrasah/ Pondok Pesantren Penerima BOS Per 30 Juli 2020



Peran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu madrasah negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Namun pada tahun



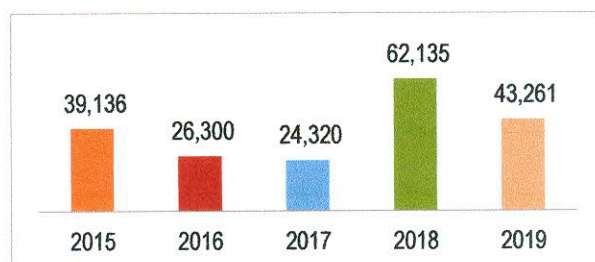
2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh Provinsi

Tabel 1.15 : Data Siswa /Santri Madrasah/ Pondok Pesantren Penerima BSM//PIP 2015-2019

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah Siswa/ Santri Penerima				
		BSM	PIP			
		2015	2016	2017	2018	2019
1	MI	6.773	3.200	2.969	7.584	5.971
2	MTs	21.574	13.721	13.465	39.242	26.373
3	MA	10.119	8.484	6.919	13.664	8.833
4	Ponpes Salafiyah Tingkat Ula	28	156	167	143	142
5	Ponpes Salafiyah Tingkat Wustha	642	739	800	1.502	1.942

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Grafik 1.4 : Jumlah Siswa/ Santri Madrasah/ Pondok Pesantren Penerima BSM/ PIP Per 30 Juli 2020



Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi. Dalam program tersebut, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, melaksanakan perannya dengan melakukan sosialisasi program serta penyelenggaraan seleksi bagi calon penerima beasiswa. Data santri yang lulus seleksi calon peserta PSSB tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.16 : Data Kelulusan Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015-2019

No	Perguruan Tinggi Mitra	Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	UGM Yogyakarta	1	1	1	1	-	4
2	UNDIP Semarang	-	-	-	-	1	1
3	Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya	-	-	2	2	-	4
4	UIN Walisongo Semarang	1	2	4	1	-	8
5	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2	4	3	3	-	12



No	Perguruan Tinggi Mitra	Tahun					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
6	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	-	-	1	-	2	2
7	UIN Sunan Gunung Djati	1	3	2	-	1	7
8	UIN Syarif Hidayatullah	1	-	-	-	-	1
9	UIN Sunan Ampel Surabaya	-	1	2	2	1	6
10	Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta	-	-	-	1	1	2
11	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	1	1	-	1	1	4
Jumlah		6	12	15	12	7	52

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Dari tabel 1.16 tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah santri yang lulus (diterima pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keagamaan) melalui program Seleksi Beasiswa Santri Berprestasi. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses bagi santri di Sumatera Barat untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi melalui fasilitasi Kementerian Agama.

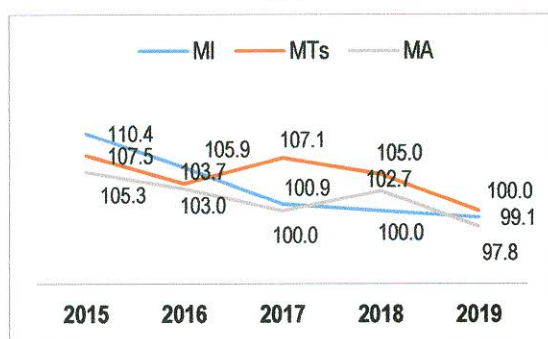
Dari berbagai program yang dijalankan dalam rangka peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama maupun pendidikan keagamaan, angka partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel/ grafik berikut:

Tabel 1.17: Target dan Capaian APK MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya Sumatera Barat 2015-2019

Lembaga Pendidikan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
MI	2,97	3,28	3,07	3,25	3,25	3,28	3,28	3,28	3,28	3,25
MTs	3,35	3,60	3,47	3,60	3,36	3,60	3,43	3,60	3,60	3,60
MA	28,60	30,11	29,22	30,11	30,11	30,11	29,32	30,11	30,78	30,11
PP Ula	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	120,0
PP Wustha	0,72	0,96	0,72	0,86	0,72	0,76	0,72	0,72	0,72	100,0

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Grafik 1.5 : Persentase APK MI, MTs dan MA



Grafik 1.6 : Persentase APK Ula, Wustha dan Ulya





Persentase APK MI sampai dengan MA dari tahun 2015-2018 selalu berhasil mencapai target pada tiap tahunnya. Pada jenjang MTs dan MA capaian APK pada tahun 2018 dan 2019 tidak memenuhi target. Hal ini tidak serta merta dimaknai sebagai penurunan minat dan animo masyarakat terhadap MTs dan MA. Begitu juga pada jenjang pendidikan Ula dan Wustha, dari tahun 2015-2019 berhasil mencapai target tiap tahunnya. Ketidakberhasilan pencapaian target pada tiga tahun terakhir terjadi pada jenjang pendidikan Tingkat Ulya.

Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan jumlah peserta didik pada MTs/Wustha belum dapat mengimbangi penambahan jumlah penduduk pada jenjang usia MTs/Wustha dalam kurun waktu tahun 2018- 2019. Hal ini juga memberikan indikasi bahwa penentuan angka target APK untuk jenjang Ulya cenderung over estimate, sehingga dalam 5 tahun terakhir target tidak terpenuhi. Namun demikian, terdapat kecenderungan capaian APK meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.18 : Target dan Capaian APM MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya Sumatera Barat 2015-2019

Lembaga Pendidikan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
MI	2,97	3,05	3,09	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,20	3,05
MTs	20,42	20,89	21,27	20,89	20,89	20,89	20,64	20,89	21,71	20,89
MA	7,16	7,71	7,79	7,71	7,71	7,71	7,7	7,71	8,08	7,71
Ula	0,03	0,06	0,03	0,05	0,03	0,048	0,03	0,045	0,03	0,04
Wustha	0,47	0,93	0,47	0,83	0,47	0,74	0,47	0,69	0,47	0,69

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Tabel 1.19 : Angka APK MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya Sumatera Barat 2015-2019

Lembaga Pendidikan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
MI	102,69	98,71	100,00	100,00	95,31
MTs	102,30	98,21	100,00	101,21	96,22
MA	107,68	98,97	100,00	100,13	95,42
Ula	200,00	166,67	160,00	150,00	133,33
Wustha	197,87	176,60	157,45	146,81	146,81

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Dari tabel 1.19, dapat dilihat bahwa pada dasarnya untuk jenjang MI/Ula, APM selalu berhasil mencapai target pada tiap tahunnya. Sedangkan untuk jenjang MTs terdapat fluktuasi capaian APM dalam 5 tahun terakhir, namun secara umum belum dapat memenuhi target. Demikian juga untuk APM jenjang MA. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan over estimate dalam menetapkan angka target dalam Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.



1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut:

Tabel 1.20 : Nilai Rata Rata Hasil UN MTsN/ MA Sumatera Barat 2016-2019

Rerata Nilai UN	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
MTs	52.63	50.75	51.96	52.50
MA	52.99	50.20	69.59	49.33

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi nilai rata rata yang berbeda. Sedangkan capaian nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.21 : Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2018 - 2019

No	Tahun	Nilai Rata Rata USBN PAI				Rata Rata
		SD	SMP	SMA	SMK	
1	2018	51,86	50,24	43,99	80,00	80,00
2	2019	71,40	68,31	69,70	68,00	68,00

USBN Pendidikan Agama Islam baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Terdapat kecenderungan penurunan nilai rata-rata nilai USBN Agama pada tahun 2019, salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Disamping data terkait rerata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.

Aspek lain yang menjadi indikator peningkatan mutu agama dan keagamaan adalah Indeks Integritas Siswa. Ada beberapa aspek yang diteliti dan diukur untuk menghasilkan indeks integritas siswa, antara lain; kejujuran, dapat dipercaya, tanggung jawab, adil dan menjaga kehormatan. Dari ke lima aspek tersebut, kondisi yang ada pada siswa madrasah di Sumatera Barat terlihat dari tabel 1.22



**Tabel 1.22 : Indeks Integritas Siswa Madrasah Sumatera Barat
Dalam Pelaksanaan UN 2017-2019**

Indeks Integritas UN	Tahun								
	2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
Siswa MA	79,50	78,92	99,3	79,50	79,02	99,4	79,50	86,77	109,1
Siswa MTs	79,70	79,97	100,3	79,70	81,27	102,0	79,70	83,69	105,0

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, 2019

Pada awalnya, tahun 2017 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Pada tahun 2018, aspek-aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 75, capaian siswa madrasah di Sumatera Barat baru sebesar 78,92. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan di aspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa MA Sumatera Barat dalam pengukuran indeks integritas pelaksanaan UN mencapai 86,77 dari angka target yang ditetapkan sebesar 79,50. Sedang siswa MTs mencapai 83,69 dari target yang ditetapkan 79,70. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

Beberapa capaian keberhasilan yang diraih pendidikan agama dan keagamaan Sumatera Barat ditingkat Nasional, dapat disampaikan sebagai berikut :



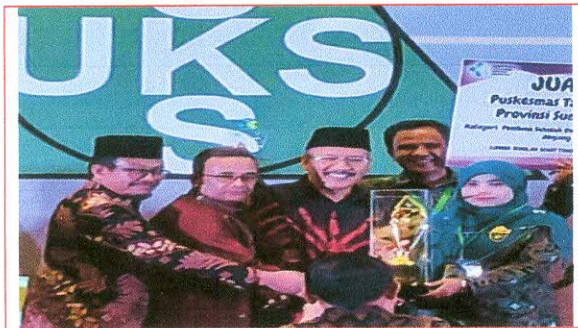
1. Meraih 6 Penghargaan Terbaik pad Lomba Kompetensi Tenaga Pendidik Berprestasi Kementerian Agama Tingkat Nasional, tahun 2016 Sumatera Barat meraih penghargaan, yaitu :
 - Juara I Kepala MA Berprestasi (Dra. Derliana, MA Kepala MA KMM Padang Panjang);
 - Juara I Kepala RA (Evi Desmariani, MPd);
 - Juara I Guru RA (Nurbaiti),
 - Juara I Guru MTsN (Ali Mutasyar, Spd dari MTsN Matur)
2. Rangking 6 pada Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Nasional yang diadakan di Manado selama enam hari belakangan, 16-21 September 2019. Memperoleh ranking



enam besar dari 34 provinsi yang ikut berlaga dengan perolehan 2 medali emas, 3 perunggu dan 4 medali perak



3. Juara II Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional 2019, yang diraih MTsN 6 Kabupaten Solok



4. Penghargaan Adiwata Mandiri Tingkat Nasional dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diraih beberapa Madrasah di Sumatera Barat (MAN 1 dan MAN 2 Padang, MTsN 1 Kabupaten Pesisir Selatan)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kanwil Kementerian Agama pada masa-masa mendatang.



1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Tujuan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama diukur menggunakan dua indikator, yaitu : 1) meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan 2) meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan, terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi pada masyarakat Sumatera Barat yang mendukung keberhasilan tujuan ini

1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan, bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya, dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.
2. Adanya budaya mengaji dan mempelajari ilmu agama sejak dini. Adanya lembaga-lembaga pendidikan agama di Indonesia yang dikhususkan untuk anak-anak dan telah membudaya berpotensi dalam mendukung peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Hal tersebut dikarenakan, dengan membudayakan sejak usia dini, umat beragama di Indonesia menjadi terbiasa dalam mengamalkan ajaran agama tersebut. Selain itu, anak-anak juga tetap merasa nyaman dalam menuntut ilmu agama karena telah menjadi budaya di kalangan masyarakat.
3. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menghormati para tokoh agama juga menjadi potensi yang baik dalam mewujudkan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Hal tersebut dikarenakan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pendekatan kepada tokoh agama untuk mengajak masyarakat dalam hal peningkatan literasi, edukasi, advokasi, dan internalisasi pemahaman dan pengamalan ajaran agama.



4. Meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti pendidikan keagamaan dan bergabung ke berbagai lembaga keagamaan, bahkan menjadikan aktivitas keagamaan sebagai gaya hidup yang populer di kalangan masyarakat akan membantu pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Di luar potensi tersebut, terdapat beberapa hal pula yang menjadi permasalahan dalam proses realiasi peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama, antara lain:

1. Masih ditemukannya sikap pengotak-kotakan di kalangan masyarakat tentang masyarakat yang memiliki kelompok dakwah yang berbeda dengan mayoritas masyarakat. Hal ini berpotensi menghambat realisasi tujuan ini karena masyarakat akan melihat latar belakang dari penyuluh agama tersebut, terutama yang berkaitan dengan dominan kelompok dakwah yang diikuti oleh penyuluh agama tersebut.
2. Masih ditemukannya oknum-oknum yang mengatasnamakan agama dalam tindakan negatif yang dilakukannya. Hal ini berpotensi mewujudkan kewaspadaan berlebih dari masyarakat terhadap penyuluh agama yang bertugas dalam mewujudkan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Indeks tersebut mencakup tiga komponen, yaitu: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.

1. Peningkatan antusiasme masyarakat Indonesia dalam mengkaji ilmu agama dan bergabung kepada lembaga-lembaga keagamaan mendorong masyarakat dalam memahami esensi agama yang kemudian berdampak pada pola pikir yang mengutamakan kerukunan dan harmonisasi umat.
2. Semakin banyaknya masyarakat yang memahami esensi agama dan meningkatkan kualitas dirinya kepada sikap saling peduli dengan sesama berpotensi mewujudkan kerukunan umat



beragama di Sumatera Barat.

3. Pembiasaan hidup berdampingan, juga mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan esensi beragama yang memiliki sikap saling menghargai antarumat beragama.
4. Kebiasaan hidup berdampingan dengan kondisi multikultural, menjadi potensi menciptakan masyarakat yang mampu bersikap toleran atas keyakinan yang dianut oleh masyarakat sekitarnya.
5. Lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang mengajak perlunya bersikap toleran sebagai pemersatu bangsa.
6. Meningkatnya kesadaran dari masyarakat untuk menghormati masyarakat yang memeluk kepercayaan lain juga menjadi potensi dalam meningkatkan toleransi umat beragama di Indonesia yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan melihat kondisi kehidupan bergama di Sumatera Barat, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional sebagai berikut.

1. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat *plural*, kerap kali memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dan itu dikawatirkan akan berpengaruh pada kerukunan umat beragama di Sumatera Barat
2. Masih ditemukannya masyarakat yang belum serius dalam mengkaji ilmu agama sehingga belum menemukan esensi dari agama yang dianutnya dan justru menunjukkan kecenderungan sikap yang bertolak belakang dengan kerukunan umat beragama.
3. Adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam dengan perilaku umat Islam. Di satu sisi, berbagai kegiatan keislaman tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang terus meningkat.
4. Masih terjadi sejumlah konflik yang disertai kekerasan dengan mengatas namakan agama. Hal ini mencerminkan masih berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi



negatif bagi keberhasilan pembangunan nasional yang mempengaruhi sikap toleran masyarakat Sumatera Barat.

5. Maraknya tampilan wajah keislaman di media yang kurang memberikan daya pencerahan yang baik sehingga mengakibatkan terjadinya pendangkalan ajaran Islam.
6. Masih ditemukannya golongan-golongan yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap umat yang berbeda keyakinan menjadi penghambat pemerintah dalam mewujudkan toleransi umat beragama di Indonesia.
7. Belum semuanya masyarakat memahami bahwa esensi agama mendorong umatnya untuk bersikap baik kepada sesama manusia seringkali bersikap intoleran kepada masyarakat yang berbeda keyakinan yang kemudian berpotensi menimbulkan kekacauan di antara masyarakat.

1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Potensi yang dimiliki Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama :

1. Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan;
2. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
3. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontinu. Penyediaan kitab suci sudah dilakukan 2.749.282 buah kitab suci dan buku keagamaan untuk seluruh agama dan segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan
4. Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik;



5. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;
6. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal
7. Adanya prodi Manajemen Haji dan Umroh di UIN Imam Bonjol Padang memberikan pengakuan bahwa Manajemen Haji dan Umrah merupakan ilmu yang selalu dikaji dan berkembang, menjadi standar ideal dari sudut keilmuan sehingga dapat dijadikan alat ukur dalam menilai penyelenggaraan haji dan umrah. Hasil penelitian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan kontribusi yang dapat dijadikan referensi untuk peningkatan penyelenggaraan haji dan umroh dari segala aspek;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan digitalisasi berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;
2. Bimwin menjadi kegiatan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai prasyarat membangun keluarga yang tangguh
3. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa bidang pelayanan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga perlu diperluas agar menjangkau kalangan remaja melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
5. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;



6. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk menyelesaikan dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal

1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan agama dan keagamaan di Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin
2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan program kesetaraan;
3. Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah
4. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
6. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
7. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
8. Dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap lembaga pendidikan dasar, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan lembaga setempat

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;



2. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
3. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengenai pendanaan.

1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Di Sumatera Barat terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
2. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
3. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
4. Penerapan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
5. Guru dan pengawas PAI di Sumatera Barat banyak yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
6. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :

1. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya.
2. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada. Masih banyak dilakukan tugas rangkap;
3. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
4. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
5. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.



BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mempedomani Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020 – 2024 yaitu **“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**, diupayakan dapat dicapai melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

2.1 TUJUAN

Untuk mencapai misi Kementerian Agama di Sumatera Barat, maka Kementerian Agama menetapkan **6 (enam) tujuan** sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan 5 (lima) dari 6 (enam) tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;



3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2 SASARAN

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama, ditetapkan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 Sasaran Strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mendukung 11 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- 1) Nilai kinerja penyuluh agama;
- 2) Persentase penyuluh agama yang dibina;
- 3) Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
- 4) Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan



2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
- 2) Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
- 3) Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu : persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
- 4) Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;



- b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
- 5) Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
- 6) Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
- 7) Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
- 8) Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - d. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama
- 9) Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)



sebagai berikut :

- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
- b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

3. Peningkatan keselarasan relasi Agama dan budaya

Peningkatan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatas namakan agama

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :

- 1) Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
- 2) Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) , yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak);
- 3) Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ, Pesparawi, Utsawa dll);
- 4) Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agamadengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.



4. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu yang dibina.
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu : jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hitta sukhaya.



- 4) Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
- 6) Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
- 7) Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.
- 8) Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (continuity service).

5. Peningkatan Pemanfaatn Ekonomi Keagamaan Umat

Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.



2) Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :

- a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
- b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
- c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

6. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
- b. Persentase pendidikan diniyah/muadallah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
- c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
- d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
- e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.

2) Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;



- b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah;
 - f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah.
- 3) Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
- a. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

7. Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS7), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
- a. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;



- f. Persentase Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
- 2) Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;
 - b. Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah;
 - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah;
 - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
- 3) Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
- 4) Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu : jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;



- b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/ MGMP dan AKG;
 - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi.
- 2) Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
- 3) Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase GPAI yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1;
 - d. Persentase Calon Pengawas Madrasah yang menerima beasiswa S2.
- 4) Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
- a. Persentase guru/ tenaga pendidikan di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus

9. Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan



Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS9), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- 1) Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
- 2) Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : Persentase siswa/ santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

10. Peningkatan Kualitas Kualitas Mental/Karakter Siswa

Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), sebagai berikut :
 - a. Persentase MTs/MA/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - b. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
 - c. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.
- 2) Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.



11. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS11), dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
- 4) Meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan



dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :

- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
- 5) Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
- 6) Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasidengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
- 7) Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasidengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
- 8) Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;



- b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
- 9) Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
- 10) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
- 11) Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
- 12) Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yakni : persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
- 13) Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
- 14) Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut :
- a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.



- 15) Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

2.3 RUMUSAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

Dalam pelaksanaan Renstra Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat Periode 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab dan sumber data Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) (lihat Tabel 2.1).



Tabel 2.1 : Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluhan agama 2. Persentase penyuluhan agama yang dibina 3. Jumlah penyalir agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan Persentase penyuluhan agama yang berawasan moderat	1. Menggunakan Aplikasi e_Kinerja Penyuluhan Agama 2. Jumlah penyuluhan yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluhan yang ada dikalikan 100% 3. Jumlah penyalir agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan Jumlah penyuluhan agama yang dibina berawasan moderat dibagi jumlah penyuluhan agama x 100%	Bidang Panais Zawa, dan Bimas Bimas	Bidang Panais Zawa, dan Bimas Bimas	Triwulan/ Tahunan
2	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama					
3	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah yang dibina 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan Jumlah siaran keagamaan yang berawasan moderat di media massa dan ruang publik	1. Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi jumlah semua rumah ibadah x 100% 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan Jumlah siaran keagamaan yang berawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bidang Panais Zawa, dan Bimas Bimas	Bidang Panais Zawa, dan Bimas Bimas	Triwulan/ Tahunan
4	Meningkatnya kegiatan penyaliran agama di ruang publik					
5	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 2. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 3. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 4. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; 5. Persentase pengawas pendikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 2. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama; 3. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 4. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; 5. Persentase pengawas pendikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	Bidang Panais Zawa, Bidang Urais Binsyar dan Semua Bimas	Bidang Panais Zawa, Bidang Urais Binsyar dan Semua Bimas	Triwulan/ Tahunan



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
6	Mengukatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan	6. Persentase pengawas pendikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; 1. Persentase pesantren yang berawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Quran	6. Persentase pengawas pendikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama; 1. Persentase pesantren yang berawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Quran	Bidang Pakis	Bidang Pakis	Triwulan/ Tahunan
7	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)			
8	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengalaman nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh: Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh: Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Bidang Penals Zawa dan Bimas Bimas	Bidang Penals Zawa dan Bimas Bimas	Triwulan/ Tahunan
9	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina			
10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi; 4. Jumlah bimbingan layanan syaria yang disediakan; 5. Jumlah masjid/ mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat; 6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina; 7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi; 4. Jumlah bimbingan layanan syaria yang disediakan; 5. Jumlah masjid/ mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat; 6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina; 7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar			
11	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Bidang Urais dan Bimas-Bimas	Bidang Urais dan Bimas-Bimas	Triwulan/ Tahunan



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah penghulu yang dibina	4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah penghulu yang dibina			
12	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah /kristiani /bahagial/ sukinah/ hita sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah /kristiani /bahagial/ sukinah/ hita sukhaya			
13	Meningkatnya kualitas pem binaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi			
14	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan			
15	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Bidang PHU	Bidang PHU	Triwulan/ Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pem binaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji			
17	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)			
18	Meningkatnya pengelolaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina			
19	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	Bidang Penais Zawa	Bidang Penais Zawa	Triwulan/ Tahunan
20	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembela jaran inovatif dalam kurikulum 2. Persentase pendidikan diniyah / mu dalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 3. Persentase sekolah yang menerapkan metode pembela jaran inovatif dalam kurikulum;	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembela jaran inovatif dalam kurikulum 2. Persentase pendidikan diniyah / mu dalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 3. Persentase sekolah yang menerapkan metode pembela jaran inovatif dalam kurikulum;	Bidang Penmad, Bidang Pakis, dan Semua Bimas	Bidang Penmad, Bidang Pakis, dan Semua Bimas	Triwulan/ Tahunan



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
21	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	Bidang Penmad, Bidang Pakis, dan Semua Bimas	Bidang Penmad, Bidang Pakis, dan Semua Bimas	Triwulan/ Tahunan
		5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan anikeluruan	5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan anikeluruan			
		1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;			
		2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadallah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadallah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;			
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan			
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah			
22	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah.	5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah.	Bidang Penmad dan Bidang Pakis	Bidang Penmad dan Bidang Pakis	Tahunan
		6. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah	6. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah			
23	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadallah yang menerapkan TIK untuk e_pembelajaran	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadallah yang menerapkan TIK untuk e_pembelajaran	Bidang Penmad dan Bidang Pakis	Bidang Penmad dan Bidang Pakis	Tahunan
		2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e_pembelajaran	2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e_pembelajaran			
		1. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	1. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana			
		2. Persentase MI/Uiya yang memenuhi SPM sarana prasarana	2. Persentase MI/Uiya yang memenuhi SPM sarana prasarana			
		3. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	3. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana			
		4. Persentase MA/Uiya yang memenuhi SPM sarana prasarana	4. Persentase MA/Uiya yang memenuhi SPM sarana prasarana			



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	Bimas Buddha	Bimas Buddha	Tahunan
24	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afimasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah; 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah 4. Persentase siswa penerima PIP pada Muadalah	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah; 3. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah 4. Persentase siswa penerima PIP pada Muadalah			
25	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren			
26	Menguatnya pelayanan Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA yang tingkatan mutunya melalui BOP			
27	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	1. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi; 2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	Bidang Penmad dan Bidang Pakis	Bidang Penmad dan Bidang Pakis	Triwulan/ Tahunan
28	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal			
29	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase GPAI yang mengikuti PPG 3. Persentase GPA berkualifikasi minimal S1	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase GPAI yang mengikuti PPG 3. Persentase GPA berkualifikasi minimal S1			



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
		4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2			
30	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/ tenaga pendik di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase GPAI di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus	1. Persentase guru/ tenaga pendik di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase GPAI di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus			
31	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah /muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah/ pendidikan diniyah /muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi			
32	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional			
33	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/ Pesan tren yang mengintegrasikan pendik di karakter dalam pembelajran 2. Persentase Kepala Pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar nyaman dan aman 3. Persentase madrasah yang ramah anak	1. Persentase MTs/MA/ Pesan tren yang mengintegrasikan pendik di karakter dalam pembelajran 2. Persentase Kepala Pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar nyaman dan aman 3. Persentase madrasah yang ramah anak	Bidang Penmad dan Bidang Pakis	Bidang Penmad dan Bidang Pakis	Triwulan/ Tahunan
34	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemu da dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditin daklanjuti	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditin daklanjuti			
35	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan 2. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkate gori sedang (minimum 7) 3. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi/jabatannya	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan 2. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkate gori sedang (minimum 7) 3. Persentase ASN yang meme nuhi syarat leveling kompetensi/jabatannya	Baglan Tata Usaha		
				Subbag Hukum dan Kepegawalam	Subbag Hukum dan Kepegawalam	Tahunan



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
36	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Subbag Hukum dan Kepegawaian	Tahunan
		2. Persentase laporan pemasa lahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberian tian dan pensiun yang ditin daklanjuti	2. Persentase laporan pemasa lahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberian tian dan pensiun yang ditin daklanjuti			
		3. Persentase kesesuaian paman faatan hasil assesmen kompe tensi dengan jabatan	3. Persentase kesesuaian paman faatan hasil assesmen kompe tensi dengan jabatan			
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkate gori sedang (minimim 7)	4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkate gori sedang (minimim 7)			
		5. Persentase ASN yang meme nuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	5. Persentase ASN yang meme nuhi syarat leveling kompetensi jabatannya			
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu			
		7. Persentase data ASN yang diupdate	7. Persentase data ASN yang diupdate			
		8. Persentase layanan administ rasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	8. Persentase layanan administ rasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses			
37	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	Subbagian Keuangan dan BMN	Subbagian Keuangan dan BMN	Semester
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengenda lian Intern Pelaporan Keuang an (PIPK)	2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengenda lian Intern Pelaporan Keuang an (PIPK)			Tahunan
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal			Bulanan
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara	4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara			Tahunan
38	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuratabel	1. Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	1. Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya			Semester
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	2. Persentase tanah yang bersertifikat			Semester
		3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN			Tahunan
39	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tahunan



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SABARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
40	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti			
		1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas			
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi			
		3. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengen dalan rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	3. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengen dalan rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti			
41	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Triwulan/ Tahunan
42	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Subbagian Umum dan Humas	Subbagian Umum dan Humas	Triwulan/ Tahunan
43	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persurat an, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu			
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik			
		3. Persentase surat yang diarsip kan dalam e-dokumen	3. Persentase surat yang diarsip kan dalam e-dokumen			
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	4. Persentase menurunnya lelang gagal			
44	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	5. Persentase menurunnya sangah dan sangah barding	5. Persentase menurunnya sangah dan sangah barding	Subbagian Umum dan Humas	Subbagian Umum dan Humas	Triwulan/ Tahunan
45	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan			
		1. Persentase jumlah pemberian capaian program dan pelaksana naan kegiatan yang dipublikasi	1. Persentase jumlah pemberian capaian program dan pelaksana naan kegiatan yang dipublikasi			
		2. Persentase pemberian negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	2. Persentase pemberian negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter			
46	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan	Persentase rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan	Subbag Orjala dan KUB	Subbag Orjala dan KUB	Tahunan
47	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti			
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina			
		3. Jumlah desa/ kampung sadar kerukunan yang dibina	3. Jumlah desa/ kampung sadar kerukunan yang dibina			



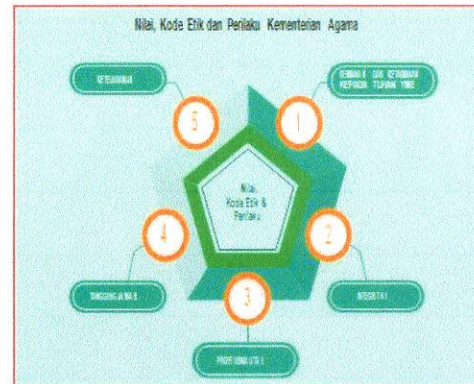
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB IKSK	SUMBER DATA IKSK	PERIODE PELAPORAN
48	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan			
49	Menguatnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP			
50	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan			
51	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	1. Persentase satuan kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 2. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti			
52	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi imple mentasi Reformasi Birokrasi 2. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 3. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 4. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplemen tasikan program kerja	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi imple mentasi Reformasi Birokrasi 2. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 3. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 4. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplemen tasikan program kerja			
53	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan			
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Persentase jumlah Pengawas, Guru, dan Pegawai yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Persentase jumlah Pengawas, Guru, dan Pegawai yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha	Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha	Tahunan



2.4 Nilai-nilai Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama menetapkan lima nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN pelaksana pembangunan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri

Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama. Nilai-nilai dimaksud adalah



1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- Tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/ atau sumpah/janji jabatan;
- Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Melaksanakan tugas kemanusiaan;
- Menumbuhkan kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- Membina kerukunan hidup beragama;
- Tidak bertindak diskriminatif;
- Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- Bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.



2. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. Tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. Tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. Tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. Tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. Bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah- langkah perbaikan dengan segera;
- c. Bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;



- d. Tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. Tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama
- f. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. Tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. Tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. Mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

- a. Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:
- b. Mengutamakan tugas dan fungsi;
- c. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan tugas secara patuh, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- e. Memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- f. Melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;



- g. Tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat. Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. Tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. Tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. Bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. Bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.



BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka melaksanakan arah dan kebijakan Kementerian Agama, tahun 2020 Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat melaksanakan 8 (delapan) Program, sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam
4. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
5. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
6. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
7. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
8. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sebagai akibat restrukturisasi program yang dilakukan Pemerintah, mulai tahun 2021 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 (empat) Program yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi, beserta Indikator Sasaran Programnya, terinci sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Nama Program	Sasaran Program (Out Come) / Indikator Kinerja Sasaran Program
025.01-Program Dukungan Manajemen	
SP.1.1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama
IKSP.1.1.1	Persentase Laporan Keuangan satker yang sesuai SAP
IKSP.1.1.2	Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal terhadap anggaran
IKSP.1.1.3	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif
SP.1.2	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama
IKSP.1.2.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
IKSP.1.2.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
IKSP.1.2.3	Nilai Impelementasi Sistem Merit
IKSP.1.2.4	Nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
IKSP.1.2.5	Persentase satker yang mendapat nilai PMPRB minimal 82
IKSP.1.2.6	Persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai)
IKSP.1.2.7	Persentase satker yang mendapat nilai skor audit kinerja minimal 75
IKSP.1.2.8	Persentase satker yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal BB
IKSP.1.2.9	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diverifikasi



Nama Program	Sasaran Program (Out Come) / Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSP.1.2.10	Persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi
IKSP.1.2.11	Nilai Kapabilitas APIP
SP.1.3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian
IKSP.1.3.1	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan
IKSP.1.3.2	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan
IKSP.1.3.3	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian
IKSP.1.3.4	Jumlah publikasi Badan Litbang dan Diklat yang disitasi
IKSP.1.3.5	Jumlah produk penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
SP.1.4	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul
IKSP.1.4.1	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat
IKSP.1.4.2	Jumlah alumni pelatihan yang memenuhi standar
IKSP.1.4.3	Persentase capaian standar kompetensi peserta diklat
IKSP.1.4.4	Indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan
IKSP.1.4.5	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO
SP.1.5	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan
IKSP.1.5.1	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an
IKSP.1.5.2	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an
IKSP.1.5.3	Jumlah viewer yang memanfaatkan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama
IKSP.1.5.4	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an
IKSP.1.5.5	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN

2. Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama

Nama Program	Sasaran Program (Out Come) / Indikator Kinerja Sasaran Program
025-02-Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama	
SP.2.1	Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama
IKSP.2.1.1	Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama
IKSP.2.1.2	Persentase konflik antarumat beragama yang diselesaikan
SP.2.2	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama
IKSP.2.2.1	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
IKSP.2.2.2	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal
SP.2.3	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama
IKSP.2.3.1	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan
SP.2.4	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama
IKSP.2.4.1	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama
SP.2.5	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama
IKSP.2.5.1	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan
SP.2.6	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan
IKSP.2.6.1	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital
IKSP.2.6.2	Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran
IKSP.2.6.3	Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan
SP.2.7	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan
IKSP.2.7.1	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan
IKSP.2.7.2	Persentase peningkatan wakaf produktif



Nama Program	Sasaran Program (Out Come) / Indikator Kinerja Sasaran Program
SP.2.8	Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel
IKSP.2.8.1	Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota
IKSP.2.8.2	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
IKSP.2.8.3	Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji
IKSP.2.8.4	Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji
SP.2.9	Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar
IKSP.2.9.1	Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi
IKSP.2.9.2	Persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi
SP.2.10	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal
IKSP.2.10.1	Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan
IKSP.2.10.2	Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan
SP.2.11	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal
IKSP.2.11.1	Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM
IKSP.2.11.2	Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM

3. Program Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran

Nama Program	Sasaran Program (Out Come) / Indikator Kinerja Sasaran Program
025-03-Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	
SP.3.1	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat
IKSP.3.1.1	Rerata nilai UASBN/ UMBN/Ujian Satuan Pendidikan yang bermuatan moderasi beragama
SP.3.2	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa
IKSP.3.2.1	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi
	a. Literasi
	b. Numerasi
IKSP.3.2.2	Rerata nilai asesmen kompetensi minimum dalam kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika, sains dalam PISA
	a. Membaca
	b. Matematika
	c. Sains
SP.3.3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan
IKSP.3.3.1	Persentase guru/ustadz bersertifikat pendidik
SP.3.4	Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP
IKSP.3.4.1	Persentase provinsi yang jumlah gurunya memenuhi SNP per jenjang
SP.3.5	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan
IKSP.3.5.1	Persentase madrasah/ sekolah pendidikan keagamaan yang memenuhi 8 SNP
IKSP.3.5.2	Persentase madrasah/ sekolah pendidikan keagamaan yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan
SP.3.6	Menguatnya pendidikan karakter siswa
IKSP.3.6.1	Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik
SP.3.7	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerja sama dengan dunia kerja/industri
IKSP.3.7.1	Persentase MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang bekerja sama dengan dunia kerja/ industri
IKSP.3.7.2	Persentase Program Ekonomi Kerakyatan yang bekerja sama dengan dunia kerja/industri

4. Program PAUD dan Wajar 12 Tahun

Nama Program	Sasaran Program (Out Come) / Indikator Kinerja Sasaran Program
025-04-Program PAUD dan Wajar 12 Tahun	
SP.4.1	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan
IKSP.4.4.1	Persentase peningkatan siswa pada RA/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dammasekha
IKSP.4.4.2	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman
IKSP.4.4.3	Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman



Nama Program	Sasaran Program (Out Come) / Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSP.4.4.4	Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman
IKSP.4.4.5	Persentase peningkatan mahasiswa pada PTK/ Ma'had Aly
IKSP.4.4.6	Persentase peningkatan siswa pada Program Pendidikan Kesetaraan (PPK)

Sedangkan berbagai kegiatan yang terdapat pada 4 (empat) Program tersebut adalah :

1. Kegiatan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	
SK.1.2098.1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum
SK.1.2098.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerja sama luar negeri
2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian	
SK.1.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	
SK.1.2100.1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan
SK.1.2100.2	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi
SK.1.2101.2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan	
SK.1.2102.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran
SK.1.2102.2	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran
2103-Pembinaan Administrasi Umum	
SK.1.2103.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor
SK.1.2103.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
SK.1.2103.3	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga
2106-Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	
SK.1.2106.1	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi
SK.1.2106.2	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi
2113-Pengawasan Fungsional Pendidikan	
SK.1.2113.1	Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan pada satker pendidikan
SK.1.2113.2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko
SK.1.2113.3	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satker pendidikan
2115-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I	
SK.1.2115.1	Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan
SK.1.2115.2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko
SK.1.2115.3	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satker
2116-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II	
SK.1.2116.1	Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan
SK.1.2116.2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko
SK.1.2116.3	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satker
2117-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III	
SK.1.2117.1	Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan
SK.1.2117.2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko
SK.1.2117.3	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satker
2118-Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV	
SK.1.2118.1	Meningkatnya pengawasan atas pengelolaan keuangan
SK.1.2118.2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko
SK.1.2118.3	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi pada satker
2119-Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi	
SK.1.2119.1	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dan laporan whistle blowing system
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
2120-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	
SK.1.2120.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2120.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2120.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2120.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2120.5	Meningkatnya ASN yang profesional
2109-Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	
SK.1.2109.1	Mengembangkan tafsir agama dalam konteks budaya
SK.1.2109.2	Terwujudnya pentashihan master mushaf Al-Quran secara cermat, teliti dan cepat
SK.1.2109.3	Meningkatnya kualitas pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an
SK.1.2109.4	Terciptanya inovasi pengembangan hasil kajian
SK.1.2109.5	Terwujudnya penerbitan hasil pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an tepat waktu
SK.1.2109.6	Meningkatnya kualitas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal
2151-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	
SK.1.2151.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat
SK.1.2151.2	Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama
SK.1.2151.3	Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga administrasi yang efektif
SK.1.2151.4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi
2152-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	
SK.1.2152.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat
SK.1.2152.2	Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Keagamaan pada Kementerian Agama
SK.1.2152.3	Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis keagamaan yang efektif
SK.1.2152.4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis Keagamaan
2153-Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	
SK.1.2153.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan bidang bimas agama dan layanan keagamaan
2154-Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	
SK.1.2154.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi
SK.1.2154.2	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama
2155-Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	
SK.1.2155.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan
2156-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	
SK.1.2156.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2156.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2156.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2156.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2156.5	Meningkatnya ASN yang profesional
2219-Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	
SK.1.2219.1	Meningkatnya kompetensi pegawai administrasi di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama
5109-Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	
SK.1.5109.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam materi diklat
SK.1.5109.2	Meningkatnya kompetensi pegawai Tenaga Pendidikan pada Kementerian Agama
SK.1.5109.3	Tersedianya pengembangan sistem pelatihan tenaga teknis pendidikan yang efektif
SK.1.5109.4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis pendidikan
5311-Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	
SK.1.5311.1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan
SK.1.5311.2	Meningkatnya kualitas layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah	
SK.1.2150.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2150.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2150.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2150.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2150.5	Meningkatnya ASN yang profesional



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
5107-Pelayanan Atase Haji di Jeddah	
SK.1.5107.1	Meningkatnya kualitas pelayanan Atase di Jeddah
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	
SK.1.2135.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2135.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2135.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2135.5	Meningkatnya ASN yang profesional
2125-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	
SK.1.2125.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2125.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2125.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2125.5	Meningkatnya ASN yang profesional
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	
SK.1.2138.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2138.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2138.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2138.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2138.5	Meningkatnya ASN yang profesional
5100-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	
SK.1.5100.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan
2141-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	
SK.1.2141.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2141.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2141.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2141.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2141.5	Meningkatnya ASN yang profesional
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	
SK.1.5102.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan
2144-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	
SK.1.2144.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2144.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2144.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2144.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2144.5	Meningkatnya ASN yang profesional
5103-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	
SK.1.5103.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan
2146-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	
SK.1.2146.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2146.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2146.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2146.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2146.5	Meningkatnya ASN yang profesional
5105-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	
SK.1.5105.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan
2111-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	
SK.1.2111.1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
SK.1.2111.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
SK.1.2111.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja
SK.1.2111.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern
SK.1.2111.5	Meningkatnya ASN yang profesional



2. Kegiatan Kegiatan pada Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	
SK.2.5620.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama
SK.2.5620.2	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
SK.2.5620.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
SK.2.5620.4	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya
2104-Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	
SK.2.2104.1	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk
SK.2.2104.2	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga
2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	
SK.2.2122.1	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat
SK.2.2122.2	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf
SK.2.2122.3	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	
SK.2.2123.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama
SK.2.2123.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama
SK.2.2123.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
SK.2.2123.4	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
SK.2.2123.5	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
SK.2.2123.6	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
SK.2.2123.7	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	
SK.2.2124.1	Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama
SK.2.2124.2	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
SK.2.2124.3	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama
SK.2.2124.4	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan
2137-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	
SK.2.2137.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen
SK.2.2137.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Kristen
SK.2.2137.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
SK.2.2137.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
SK.2.2137.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
SK.2.2137.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama
SK.2.2137.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama
SK.2.2137.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
SK.2.2137.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
SK.2.2137.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan
SK.2.2137.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga
SK.2.2137.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen
2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	
SK.2.2140.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik
SK.2.2140.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Katolik
SK.2.2140.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
SK.2.2140.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
SK.2.2140.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
SK.2.2140.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama
SK.2.2140.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
SK.2.2140.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
SK.2.2140.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
SK.2.2140.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan
SK.2.2140.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga
SK.2.2140.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan katolik
2143-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	
SK.2.2143.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu
SK.2.2143.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Hindu
SK.2.2143.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
SK.2.2143.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
SK.2.2143.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
SK.2.2143.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama
SK.2.2143.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama
SK.2.2143.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
SK.2.2143.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
SK.2.2143.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan
SK.2.2143.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga
SK.2.2143.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana
2145-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	
SK.2.2145.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha
SK.2.2145.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Buddha
SK.2.2145.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
SK.2.2145.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
SK.2.2145.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
SK.2.2145.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama
SK.2.2145.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama
SK.2.2145.8	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
SK.2.2145.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
SK.2.2145.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan
SK.2.2145.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga
SK.2.2145.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha
2130-Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	
SK.2.2130.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Khonghucu
SK.2.2130.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Khonghucu
SK.2.2130.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
SK.2.2130.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
SK.2.2130.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
SK.2.2130.6	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
SK.2.2130.7	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
SK.2.2130.8	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan
SK.2.2130.9	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana kebajikan
2126-Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	
SK.2.2126.1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri	
SK.2.2147.1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji
SK.2.2147.2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
2148-Pembinaan Haji	
SK.2.2148.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji
2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	
SK.2.2149.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel
SK.2.2149.2	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu
5310-Pelayanan Haji Luar Negeri	
SK.2.5310.1	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi

3. Kegiatan Kegiatan pada Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
4422-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	
SK.3.4422.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
SK.3.4422.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif
SK.3.4422.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
SK.3.4422.4	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
SK.3.4422.5	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
SK.3.4422.6	Meningkatnya budaya mutu pendidikan
SK.3.4422.7	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan
SK.3.4422.8	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan
SK.3.4422.9	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan
SK.3.4422.10	Menguatnya penyelenggaraan pendidikan vokasi
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	
SK.3.2133.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
SK.3.2133.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
SK.3.2133.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
SK.3.2133.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik
SK.3.2133.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
SK.3.2133.6	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi
4433-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	
SK.3.4433.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama
SK.3.4433.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir
SK.3.4433.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
SK.3.4433.4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
SK.3.4433.5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
SK.3.4433.6	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
SK.3.4433.7	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi melalui peningkatan kualifikasi pendidik
SK.3.4433.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
SK.3.4433.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan
SK.3.4433.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan
SK.3.4433.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	
SK.3.2127.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama
SK.3.2127.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
SK.3.2127.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
SK.3.2127.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik
SK.3.2127.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
SK.3.2127.6	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
4434-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	
SK.3.4434.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
SK.3.4434.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir
SK.3.4434.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
SK.3.4434.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
SK.3.4434.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
SK.3.4434.6	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal
SK.3.4434.7	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan
SK.3.4434.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan
SK.3.4434.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan
SK.3.4434.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan
SK.3.4434.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan
4435-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	
SK.3.4435.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
SK.3.4435.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir
SK.3.4435.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
SK.3.4435.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
SK.3.4435.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
SK.3.4435.6	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal
SK.3.4435.7	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan
SK.3.4435.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan
SK.3.4435.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan
SK.3.4435.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan
SK.3.4435.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan
4436-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	
SK.3.4436.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
SK.3.4436.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir
SK.3.4436.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif
SK.3.4436.4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
SK.3.4436.5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
SK.3.4436.6	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal
SK.3.4436.7	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan
SK.3.4436.8	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan
SK.3.4436.9	Meningkatnya budaya mutu pendidikan
SK.3.4436.10	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan
SK.3.4436.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan
4437-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	
SK.3.4137.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
SK.3.4137.2	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal
SK.3.4137.3	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan
5621-Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	
SK.3.5621.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

4. Kegiatan Kegiatan pada Program PAUD dan Wajar 12 Tahun

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
2129-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	
SK.4.2129.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
SK.4.2129.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat



Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)
SK.4.2129.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
SK.4.2129.4	Meningkatnya kualitas penanganan ATS
2128-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	
SK.4.2128.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama
SK.4.2128.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
SK.4.2128.3	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
SK.4.2128.4	Meningkatnya kualitas penanganan ATS
2136-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	
SK.4.2136.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
SK.4.2136.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	
SK.4.2139.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
SK.4.2139.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
SK.4.2139.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	
SK.4.2142.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
SK.4.2142.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
SK.4.2129.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
4012-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	
SK.4.4012.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
SK.4.4012.2	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Agama Sumatera Barat selama tahun 2020-2024, terlihat dari Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Sasaran Kegiatan (IKS) sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Target Kinerja Kementerian Agama Sumatera Barat Sampai Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA 2024	SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	80	85	Nilai	Bidang Penais Zawa, dan Bimas
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	60	100	Persentase	
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	40	80	Orang	
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	60	120	Kelompok	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	Persentase	
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	2.200	3.500	Orang	
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	4	10	Lokasi	
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	90	105	Lembaga/Orang	Subbag KUB dan Ortala
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	27	55	Kali	
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	18	20	Persentase	



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA 2024	SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	20	75	Persentase	Bidang Penais Zawa dan Subag KUB dan Ortala
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	5	5	Kali	
6	Meningkatnya kualitas mode rasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	30	85	Persentase	Bidang Penais Zawa dan Semua Bimas
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	20	45	Persentase	Bidang Urais Binsyar dan Semua Bimas
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	68	74	Persentase	
		3 Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	25	100	Orang	
		4 Jumlah rumah ibadah yang di tingkatkan menjadi percontohan	10	35	Lokasi	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	1	1	Kegiatan/ Konten	Bidang Penais Zawa dan Semua Bimas
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	100	Persentase	Bidang Penmad, Bidang Pakis dan Semua Bimas
		2 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	40	Persentase	
		3 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	4	14,50	Persentase	
		4 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	50	Persentase	
		5 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	6	28,14	Persentase	
		6 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	28,14	Persentase	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	NA	90	Persentase	Bidang Pakis
		2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	25	65	Persentase	
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	NA	5	Kali	Subbag KUB dan Ortala
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	NA	40	Even	Bidang Urais Binsyar, Bidang Penais Zawa dan Semua Bimas
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	3	21	Event	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	NA	30	Direktori	
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	NA	25	Pengelola	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA 2024	SATUAN HASIL	PENANGGUNG 111JAWAB
15 Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	30	13	Paket	Bidang Urais Binsyar, Bidang Penais Zawa dan Semua Bimas
	2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	480	980	Buah	
	3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	30	80	Persentase	
	4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	19	30	Layanan	
	5 Jumlah masjid/ mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	39	50	Lokasi	
	6 Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;	19	29	Orang	
	7 Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	NA	20	Lokasi	
16 Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	4	12	KUA	
	2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	73	23	KUA	
	3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	1.800	2.430	Orang	
	4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	1.040	1.579	Orang	
	5 Jumlah penghulu yang dibina	291	180	Orang	
17 Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah /kristiani /bahagia/ sukinah/ hitta sukhaya	NA	270	Keluarga	Bidang PHU
18 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	75,71	100	Persentase	
19 Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	5,26	100	Persentase	
	2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,68	0,74	Persentase	
20 Meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	33,10	100	Persentase	
	2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	Persentase	
21 Meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	98,85	100	Persentase	
22 Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	100	Persentase	Bidang Penais Zawa
23 Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	NA	50	Persentase	
	2 Persentase lembaga zakat yang dibina	70	90	Persentase	
24 Meningkatkan pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	40	75	Persentase	Bidang Penais Zawa
	2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	45	75	Persentase	
	3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	60	80	Persentase	
25 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1 Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	70	95	Persentase	Bidang Penmad, dan Bidang Pakis
	2 Persentase pendidikan diniyah / muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	NA	85	Persentase	



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA 2024	SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	3 Persentase sekolah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	NA	90	Persentase	
		4 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	1	6	Madrasah	
		5 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	3	10	Madrasah	
		1 Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	48,48	50	Persentase	
		2 Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	NA	55	Persentase	
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	3 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	NA	70	Persentase	
		4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	13	46	Penghargaan	
		5 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah.	NA	4	Kegiatan	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	5	50	Persentase	
		2 Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	NA	60	Persentase	
		3 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	5	50	Persentase	
		1 Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	70.00	Persentase	
		2 Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	78	82	Persentase	
		3 Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	78	82	Persentase	
		4 Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	72	85	Persentase	
		5 Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	72	85	Persentase	
		6 Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	78	85	Persentase	
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	7 Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	78	86	Persentase	
		8 Persentase PDF/ Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	20	70	Persentase	
		9 Persentase Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	1,9	2,3	Persentase	
		Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	85	Persentase	Bimas Buddha
		1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	147.665	179.784	Siswa	Bidang Penmad dan Bidang Pakis
		2 Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah;	4.297	4.800	Siswa	
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah	25,32	22	Persentase	
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Muadalah	60	85	Persentase	



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA 2024	SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	NA	1,5	Persentase	Bidang Penmad dan Bidang Pakis
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	20	70	Persentase	
31	Menguatnya pelayanan Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	14.082	16.008	Siswa	
32	Meningkatnya kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	1 Persentase Ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;	NA	43	Persentase	
		2 Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	30	80	Persentase	
		3 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	10	47	Persentase	
		4 Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	NA	60	Persentase	
		5 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	30	70	Persentase	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95,95	100	Persentase	
		2 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	65	90	Persentase	
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	2	7	Persentase	
		2 Persentase GPAI yang mengikuti PPG	65	90	Persentase	
		3 Persentase GPAI berkualifikasi minimal S1	77,5	85	Persentase	
		4 Persentase Calon/ Pengawas Madrasah yang menerima beasiswa S2	NA	2,5	Persentase	
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1 Persentase guru/ tenaga pendidikan di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus	90	100	Persentase	
		2 Persentase GPAI di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus	NA	20	Persentase	
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1 Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	721	775	Lembaga	
		2 Jumlah pendidikan diniyah /muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	7	30	Lembaga	
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	NA	90	Persentase	
		2 Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,13	1,3	Persentase	
		3 Persentase santri pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,4	2,0	Persentase	
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	NA	90	Persentase	



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA 2024	SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	2 Persentase Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	NA	30	Persentase	Bidang Penmad dan Bidang Pakis
		3 Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar nyaman dan aman	NA	30	Persentase	
		4 Persentase madrasah yang ramah anak	NA	80	Persentase	
		1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	NA	120	Organisasi Ekskul	
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	NA	222	Gugus Pramuka	
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	80	92	Persentase	Bagian TU (Subbag Hukum dan Kepegawaian)
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	54,55	100	Persentase	
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	9	21	Kegiatan	
41	Meningkatnya kualitas pelayanan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan	90	100	Persentase	Bagian TU (Subbag Ortala dan KUB)
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	70	85	Persentase	Bagian TU (Subbag Hukum dan Kepegawaian)
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	80	98	Persentase	
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	85	97	Persentase	
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	65	90	Persentase	
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	80	100	Persentase	
		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90	98	Persentase	
		7 Persentase data ASN yang diupdate	85	98	Persentase	
		8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	85	95	Persentase	
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	510	510	Laporan	Bagian TU (Subbag Keuangan dan BMN)
		2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	98,41	98,71	Persentase	
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	98,36	98,51	Persentase	
		4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara	97,89	98,23	Persentase	
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	40,48	99,35	Persentase	
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	75,34	98,28	Persentase	
		3 Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	85,78	97,79	Persentase	
45	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penguatan manajemen	1 Persentase satuan kerja yang menetapkan dan mengevaluasi	20	100	Persentase	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA 2024	SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
men organisasi	standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis				Bagian TU (Subbag Ortala dan KUB)
	2 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	80	100	Persentase	
46 Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	40	100	Persentase	
	2 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	40	100	Persentase	
	3 Jumlah satuan kerja yang dibangun dalam peningkatan zona integritas	40	100	Persentase	
	4 Jumlah agen perubahan yang dibangun untuk mengimplementasikan program kerja	5	25	Persentase	
47 Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	99	Persentase	Bagian TU (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
	2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	65	99	Persentase	
	3 Persentase perencanaan kerja sama yang ditindaklanjuti	85	99	Persentase	
48 Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	92,26	98	Persentase	
	2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70	98	Persentase	
	3 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	90	98	Persentase	
49 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	99,14	99,35	Persentase	Bagian TU (Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat)
50 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	99,10	99,45	Persentase	
	2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	99,15	99,50	Persentase	
	3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	99,20	99,45	Persentase	
	4 Persentase lelang gagal	20	0	Persentase	
	5 Persentase sanggah dan sanggah banding	30	0	Persentase	
51 Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	99,10	99,45	Persentase	
52 Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Persentase jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	75	85	Persentase	Bagian TU (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
	2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	99,10	99,70	Persentase	
53 Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	70	98	Persentase	Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
54 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Persentase jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	90,10	98,00	Persentase	

Secara rinci target kinerja yang ditetapkan pertahunnya dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat dari tabel 3.2

Tabel 3.2 : Rincian Target Kinerja Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat dari Tahun 2020 Sampai Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA				SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	80	80	82	83	84	85	Bidang Penais Zawa, dan Bimas
	1 Nilai kinerja penyuluhan agama						Nilai	
	2 Persentase penyuluhan agama yang dibina	60	60	70	70	80	100	
	3 Jumlah penyar agama yang dibina kompetensi	40	NA	40	50	65	80	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan beragama	60	80	90	100	110	120	Subbag KUB dan Ortala
	4 Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan						Kelompok	
	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase	
	2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	2.200	2.380	2.580	2.800	3.200	3.500	
3	Meningkatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	4	5	7	8	9	10	Subbag KUB dan Ortala
	3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina						Lokasi	
	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, an, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	90	95	100	105	105	105	
	2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	27	33	40	45	50	55	
4	Meningkatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	18	18	18	20	20	20	Bidang Penais Zawa dan Subbag KUB dan Ortala
	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP						Persentase	
	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, an, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	20	45	55	65	70	75	
	2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	5	5	5	5	5	5	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	30	30	40	50	75	85	Bidang Penais Zawa dan Semua Bimas
	Persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat						Persentase	
	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	20	25	30	35	40	45	
	2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	68	69	70	71	72	74	
6	Meningkatnya kualitas mode rasi beragama penyuluhan agama	25	40	80	80	100	100	Bidang Urals Binsyar dan Semua Bimas
	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	10	15	20	25	30	35	
	3 Jumlah Inam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya						Orang	
	4 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan						Lokasi	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024		
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	1	1	1	1	1	Kegiatan/Konten	Bidang Penafsiran Zawa dan Semua Bimas
9	Meningkatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	70	80	90	100	Persentase	Bidang Pemad, Bidang Pakis dan Semua Bimas
		2. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	18	27	35	40	Persentase	
		3. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	4	14,5	14,50	14,50	14,50	Persentase	
		4. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	10	18	28	34	Persentase	
		5. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	6	9,28	20,10	20,84	21,85	Persentase	
		6. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	10,50	20,10	20,84	21,85	Persentase	
10	Meningkatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	NA	15	30	50	75	Persentase	Bidang Pakis
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Qur'an	25	30	40	47	55	Persentase	
11	Meningkatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	NA	1	2	3	4	Kali	Subbag KUB dan Orfella
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	NA	40	40	40	40	Even	Bidang Urals Binsyar, Bidang Penafsir Zawa dan Semua Bimas
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	3	21	3	21	3	Event	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	NA	10	15	20	25	Direktori	



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA				SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB		
				2020	2021	2022	2023			2024	
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina	NA	8	10	15	20	25	Pengelola	Bidang Urals Binsyar, Bidang Penalis Zawa dan Semua Blimas
		1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	30	5	7	9	11	13	Paket	
		2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	480	360	720	789	940	980	Buah	
		3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	30	40	50	60	70	80	Persentase	
		4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	19	22	24	26	28	30	Layanan	
		5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	39	41	43	46	48	50	Lokasi	
		6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;	19	21	23	25	27	29	Orang	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rukuk (Islam)	7	Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	NA	-	-	-	-	-	Lokasi	
		1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	4	13	6	10	11	12	KUA	
		2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	73	15	19	21	22	23	KUA	
		3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	1.800	2.000	2.100	2.205	2.315	2.430	Orang	
		4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	1.040	1.080	1.188	1.308	1.438	1.579	Orang	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	5	Jumlah penghulu yang dibina	291	140	150	180	170	180	Orang	
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah /kristiani /bahagia/ sukinah/ hita sukhaya	NA	180	180	210	240	270	Keluarga	
18	Meningkatnya kualitas Oem binaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus		Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbin dan terawasi	75,71	85,33	90,67	100	100	100	Persentase	Bidang PHU
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	5,26	10,53	10,53	31,58	63,16	100	Persentase	
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,68	0,68	100	0,74	0,74	0,74	Persentase	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	33,10	45,34	72,60	100	100	100	Persentase	
		2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Persentase	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA				SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
21	Meningkatnya pembinaan jamaah haji kualitas	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	98,85	100	100	100	100	Persentase
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	100	100	100	100	Persentase
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	NA	-	20	30	40	Persentase
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	70	40	50	55	65	Persentase
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembela jaran inovatif dalam kurikulum 2. Persentase pendidikan diniyah / muadallah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 3. Persentase sekolah yang menerapkan metode pembela jaran inovatif dalam kurikulum 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan	70	73	80	85	90	Persentase
26	Meningkatnya penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 2. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadallah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah 5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah	NA	45	55	63	74	Persentase
			NA	40	54	60	75	Persentase
			1	2	4	6	6	Madrasah
			3	5	5	10	10	Madrasah
			48,48	49	49,50	49,90	50	Persentase
			NA	15	25	30	45	Persentase
			NA	25	35	45	85	Persentase
			13	26	32	40	43	Penghargaan
			NA	1	1	2	3	Kegiatan



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024		
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	5	6	10	20	35	50	Persentase	Bidang Penmad, dan Bidang Pakis
		2 Persentase pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	NA	20	27	35	45	60	Persentase	
		3 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	5	6	10	20	35	50	Persentase	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	60	61,50	63	66,50	70,00	Persentase	Bidang Penmad, dan Bidang Pakis
		2 Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	78	80	81	81	82	82	Persentase	
		3 Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	78	79	80	80	81	82	Persentase	
		4 Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	72	75	78	82	84	85	Persentase	
		5 Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	72	73	75	80	82	85	Persentase	
		6 Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	78	80	81	82	84	85	Persentase	
		7 Persentase Ulya yang me memenuhi SPM sarana prasarana	78	79	81	83	85	86	Persentase	
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afimasi, dan berbakat	8 Persentase PDF/ Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesan tren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	20	25	40	55	60	70	Persentase	Bimas Buddha
		9 Persentase Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,3	Persentase	
		Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammasaka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	65	70	75	80	85	Persentase	
		1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	147.665	155.190	159.846	164.640	171.224	179.784	Siswa	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	2 Jumlah siswa penerima BOS pada PDF Muadalah	4.297	3.190	4.400	4.600	4.700	4.800	Siswa	Bidang Penmad dan Bidang Pakis
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah	25.32	25	24	23	22	22	Persentase	
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Muadalah	60	65	70	75	80	85	Persentase	
		1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	NA	0,5	0,8	1	1,25	1,5	Persentase	
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	20	26	35	45	56	70	Persentase	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024		
31	Menguatnya pelayanan Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	14,082	14,500	14,687	14,945	15,393	16,008	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalan yang lulus sertifikasi; 2 Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalan yang memperoleh pening katan kompetensi; 3 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalan yang memperoleh peningkatan kompetensi; 4 Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalan yang menda patkan penguatan KKG/MGMP dan AKG; 5 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	NA	8	17	26	35	43	Persentase
			30	40	50	60	70	80	Persentase
			10	15	24	32	40	47	Persentase
			NA	20	30	40	50	60	Persentase
			30	35	42	52	63	70	Persentase
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95,95	96	97	98	99	100	Persentase
			65	65	72	79	85	90	Persentase
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2 Persentase GPAI yang mengikuti PPG 3 Persentase GPA berkualifikasi minimal S1 4 Persentase Calon/ Pengawas Madrasah yang menerima beasiswa S2	2	2	3	5	7	7	Persentase
			65	65	72	79	85	90	Persentase
			77,5	80	81,7	82,5	83,5	85	Persentase
			NA	NA	2	2,1	2,2	2,5	Persentase
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1 Persentase guru/ tenaga pendidikan di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus 2 Persentase GPAI di madrasah daerah 3T yang mendapatkan tunjangan khusus	90	92	95	98	100	100	Persentase
			NA	NA	5	10	15	20	Persentase
36	Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1 Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi 2 Jumlah pendidikan diniyah /muadalan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	721	727	740	750	765	775	Lembaga
			7	7	11	15	25	30	Lembaga



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA				SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
37 Meningkatkan budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	NA	50	60	70	80	90	Persentase
	2 Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional	0,13	0,2	0,5	0,8	1,0	1,3	Persentase
	3 Persentase santri pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional	0,4	0,4	0,5	0,7	1,5	2,0	Persentase
38 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	NA	70	75	80	85	90	Persentase
	2 Persentase Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	NA	6	10	15	25	30	Persentase
	3 Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar nyaman dan aman	NA	NA	10	15	25	30	Persentase
	4 Persentase madrasah yang ramah anak	NA	40	50	60	70	80	Persentase
39 Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelaan pemu da dan pengembangan pendi dikan kepramukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelaan	NA	NA	30	60	90	120	Organisasi Ekskul
	2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	NA	43	48	62	112	222	Gugus Pramuka
40 Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	80	83	85	87	90	92	Persentase
	2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	54,55	72,73	81,84	81,82	90,91	100	Persentase
	3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	9	NA	20	20	21	21	Kegiatan
41 Meningkatkan kualitas penge lolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan	90	95	97	98	100	100	Persentase
42 Meningkatkan kualitas penge lolaan ASN (pengadaan, penem patan, Pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen peren canaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	70	70	75	78	80	85	Persentase
	2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditin dakanlanjuti	80	80	86	90	95	98	Persentase
	3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompe tensi dengan jabatan	85	85	90	93	95	97	Persentase



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA					SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB	
				2020	2021	2022	2023	2024			
43	Meningkatnya pengelolaan manajale men keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkale gori sedang (minimum 71)	65	66	70	75	80	90	Persentase	Bagian TU (Subbag Keuangan dan BMN)
		5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	80	80	85	90	95	100	Persentase	
		6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90	95	95	95	97	98	Persentase	
		7	Persentase data ASN yang diupdate	85	90	93	95	97	98	Persentase	
		8	Persentase layanan administrasi kepegawalan berbasis digital yang mudah diakses	85	85	90	93	95	95	Persentase	
		1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	510	510	510	510	510	Laporan		
		2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengenda ilan Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	98,41	98,48	98,53	98,57	98,63	Persentase		
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	98,36	98,40	98,42	98,47	98,50	Persentase		
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara	97,89	97,95	98,01	98,07	98,18	98,23	Persentase	Bagian TU (Subbag Keuangan dan BMN)
		1	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	40,48	57,17	75,31	85,52	90,12	99,35	Persentase	
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	75,34	80,57	90,41	93,53	95,17	98,28	Persentase	
		3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	85,78	89,51	93,53	95,41	96,53	97,79	Persentase	
45	Meningkatnya kualitas pene taan dan penguatan manajale men organisasi	1	Persentase satuan kerja yang mene tapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	20	40	60	80	100	100	Persentase	Bagian TU (Subbag Ortala dan KUB)
		2	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindak lanjut	80	86	89	90	95	100	Persentase	
46	Meningkatnya kualitas pene rapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implemen tasi Reformasi Birokrasi	40	60	70	80	90	100	Persentase	Bagian TU (Subbag Ortala dan KUB)
		2	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindak lanjut	40	60	70	80	90	100	Persentase	
		3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	40	60	70	80	90	100	Persentase	
		4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimpleme tasikan program kerja	5	5	10	15	20	25	Persentase	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA				SATUAN HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data 2. Persentase keselarasan mualan Renja dengan Renstra 3. Persentase perencanaan kerja sama yang ditindaklanjuti	85	86	90	95	99	Bagian TU (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
			80	85	90	95	99	
			88	89	90	96	99	
48	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemanfaatan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti 3. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	94	95	96	97	98	Bagian TU (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
			80	90	95	97	98	
			93	95	96	97	98	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kantor	1. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana Kantor sesuai standar 2. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 3. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 4. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 5. Persentase lelang gagal 6. Persentase sengketa dan sengketa banding	99,14	99,20	99,25	99,30	99,35	Bagian TU (Subbag Umum dan Hubungan Masyarakat)
			99,15	99,20	99,30	99,35	99,45	
			99,20	99,30	99,35	99,40	99,50	
			99,30	99,45	97,65	98,65	99,45	
			20	6,67	3,33	0	0	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan 2. Persentase jumlah pemberian capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 3. Persentase pemberian negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	99,10	99,20	99,36	99,45	99,45	Bagian TU (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
			75	79	82,25	84,5	85	
			99,10	99,36	99,45	99,50	99,70	
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	80	90	95	97	98	Bagian TU (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
			90,10	93,40	94,50	96,70	98,00	
54	Meningkatnya kualitas administrasi keagamaan	Persentase jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	90,10	93,40	94,50	96,70	98,00	Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha



3.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan kegiatan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat yang telah ditetapkan, memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang dan sedang berjalan adalah dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kerangka pendanaan dalam Renstra Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat 2020- 2024 meliputi pendanaan seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari : pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, pendanaan 19 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Se Sumatera Barat, pendanaan 48 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Se Sumatera Barat, pendanaan 112 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) se Sumatera Barat, pendanaan 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) se Sumatera Barat serta pendanaan BOP bagi lembaga agama dan keagamaan serta pendanaan BOP lembaga pendidikan agama dan keagamaan

Renstra Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan satuan kerja jajaran Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat. Berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.3 : Indikasi Pendanaan Kementerian Agama Sumatera Barat Tahun 2020 Berdasarkan 8 Program

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT		1.573.058.171
I	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA	62.747.408
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-
SK1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-
SK2	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	47.934.711
SK3	Meningkatnya kinerja pelaksana anggaran dan aset BMN	
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana	-
SK4	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	-
SK5	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	
SK6	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	
2103	Pembinaan Administrasi Umum	14.812.697
SK7	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	
SK8	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	
2105	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan	-
SK9	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	
SK10	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	73.875.329
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	-
SK11	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	56.334.000
SK12	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	
SK13	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	
2148	Pembinaan Haji	3.068.750
SK14	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	-
SK15	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	
SK16	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	
2150	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PHU	14.472.579
SK17	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	
III	PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM	1.239.420.344
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	153.718.719
SK18	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	
SK19	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
SK20	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	
SK21	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	
SK22	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	6.330.100
SK23	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	
SK24	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	
SK25	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	
2129	Peningkatan Mutu dan Relevansi Madrasah	217.401.154
SK26	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	
SK27	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	
SK28	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	286.776.455
SK29	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	
SK30	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
SK31	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	
SK32	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	575.193.916
SK33	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pendidikan Islam	



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)
IV	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	155.619.117
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	33.601.480
SK34	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk	
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	495.000
SK35	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	
SK36	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	14.382.910
SK37	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam	
SK38	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Islam	
SK39	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Islam	
SK40	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Islam sebagai pusat syiar agama yang toleran	
SK41	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Islam di ruang publik	
SK42	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	
SK43	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan Islam dan budaya untuk memperkuat toleransi	
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	449.250
SK44	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	
2125	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	140.291.957
SK45	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Islam	
V	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	4.684.721
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	198.000
SK46	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	437.000
SK47	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen	
SK48	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Kristen	
SK49	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Kristen sebagai pusat syiar agama yang toleran	
SK50	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	
2138	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	1.038.882
SK51	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Kristen	
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	3.010.839
SK52	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Kristen	
VI	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	3.312.534
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	564.407
SK53	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	687.000
SK54	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik	
SK55	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Katolik	
SK56	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Katolik sebagai pusat syiar agama yang toleran	
SK57	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Katolik di ruang publik	
SK58	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	
SK59	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan Katolik	
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	505.347
SK60	Terpenuhinya jumlah Guru Agama Katolik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	896.835
SK61	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Katolik	
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	1.164.292
SK62	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Katolik	
VII	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	764.410
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	30.000



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)
SK63	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	36.000
SK64	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu	
SK65	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Hindu	
SK66	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Hindu sebagai pusat syiar agama yang toleran	
SK67	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Hindu di ruang publik	
SK68	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	
SK69	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana	
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	40.000
SK70	Terpenuhinya jumlah Guru Agama Hindu dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	616.410
SK71	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Hindu	
5104	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	82.000
SK72	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Hindu	
VIII	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	1.431.856
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	230.000
SK73	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	630.560
SK74	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha	
SK75	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Buddha	
SK76	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Buddhasebagai pusat syiar agama yang toleran	
SK77	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Buddha di ruang publik	
SK78	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	
SK79	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha	
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	
SK80	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	
2146	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	81.800
SK81	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Buddha	90,00
5101	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	571.296
SK82	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Buddha	
IX	PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	655.652
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.079.131
SK83	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	

Tabel 3.4 : Indikasi Pendanaan Kementerian Agama Sumatera Barat Tahun 2021-2024 Berdasarkan 4 Program

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
		2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT		1.973.422.742	2.169.288.593	2.278.047.733	2.503.928.042
I	DUKUNGAN MANAJEMEN	881.291.295	966.346.112	1.062.944.152	1.166.161.254
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	50.000	55.000	60.500	66.550
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawai an	350.720	350.720	350.720	350.720
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	52.728.182	58.001.000	63.801.100	70.181.210
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana	150.000	165.000	180.000	195.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	527.470	580.217	638.239	702.063
2103	Pembinaan Administrasi Umum	16.293.967	17.923.363	19.715.700	21.687.270
2105	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan	36.250	39.875	43.863	48.249



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
		2021	2022	2023	2024
2150	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PHU	15.919.837	14.472.580	15.919.838	14.472.581
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	632.713.308	695.984.638	765.583.102	842.141.412
2125	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	154.321.153	169.753.268	186.728.595	205.401.454
2138	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	1.142.770	1.257.047	1.382.752	1.521.027
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	3.311.923	3.643.115	4.007.427	4.408.169
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	986.519	1.085.170	1.193.687	1.313.056
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	1.280.721	1.408.793	1.549.673	1.704.640
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	678.051	745.856	820.442	902.486
5104	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	90.200	99.220	109.142	120.056
2146	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	81.800	89.980	98.978	108.876
5101	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	628.426	691.268	760.395	836.434
II	PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	359.468.225	397.021.119	328.596.256	362.616.488
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	204.782.509	225.260.760	247.786.836	272.565.519
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	33.601.480	36.961.628	40.657.791	44.723.570
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	544.500	598.950	658.845	724.730
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	13.187.643	14.506.407	13.187.644	14.506.408
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	494.175	543.593	597.952	657.747
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	480.700	528.770	581.647	639.812
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	755.700	831.270	914.397	1.005.837
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	39.600	43.560	47.916	52.708
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	253.000	278.300	306.130	336.743
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	60.680	66.748	73.423	80.765
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	100.555.359	112.216.967	18.081.092	21.049.809
2148	Pembinaan Haji	3.375.625	3.713.188	4.084.506	4.492.957
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	1.337.254	1.470.979	1.618.077	1.779.884
III	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	485.090.038	533.595.042	586.956.566	645.650.599
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	169.090.591	185.999.650	204.599.615	225.059.576
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	315.454.101	346.999.511	381.699.462	419.869.408
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	505.347	555.881	611.489	675.615



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
		2021	2022	2023	2024
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	40.000	40.000	46.000	46.000
IV	PROGRAM PAUD DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN	247.573.183	272.324.321	299.550.760	329.499.701
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	6.963.110	7.659.421	8.425.363	9.267.899
2129	Peningkatan Mutu dan Relevansi Madrasah	239.141.269	263.055.396	289.360.936	318.297.030
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	167.476	184.114	202.524	222.652
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	547.712	602.412	662.662	728.917
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	60.000	60.000	60.000	60.000
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	693.616	762.978	839.275	923.203

BAB IV PENUTUP

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 yang terdiri dari Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang kondisi umum yang menjelaskan capaian kinerja atas pelaksanaan dan potensi masalah Rencana Strategis Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama dan pendidikan. Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2020-2024, menggambarkan secara jelas keterkaitan antara kegiatan, sarana kegiatan dan indikator sasaran kegiatan untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang agama dan pendidikan yang hendak dicapai pada Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan dasar dan acuan dalam menyusun 1) Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RKA-KL; dan (2) Rencana/ Program Pembangunan lintas sektoral.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi, harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



H. HENDRI, S.Ag, M.Pd
NIP. 19670801 199503 1 001



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
							2020	
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tatakelasa							Subag Orala dan KUB serta ubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK4	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1	Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	20,00	40,00		
		2	Persentase laporan kinerja satuan kerja yang dievaluasi	%	80,00	90,00		
		3	Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya	Bh	16	18		
		4	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	75		
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan							Subag Perdata dan ubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK5	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	1	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra	%	90	90		
		2	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	Dokumen	312	312		
SK6	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	92,26	93,00		
		2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70,00	70,00		
2103	Pembinaan Administrasi Umum						14.812.597	Subag Umum dan ubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK7	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	99,14	99,18		
SK8	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	99,00	99,15		
		2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	99,15	99,20		
		3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	99,20	99,30		



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
				2020		
	4 Persentase menurunnya lelang gagal	%	95,00	90,15		
	5 Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	96,04	91,15		
2105	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan					
SK9	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Berita	310	160		
	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi					
	2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang di counter	%	99,10	99,25		
SK10	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	%	98,1	98,15		
	Persentase data agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan terlabel					
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH				73.875.329	BIDANG PHU / KASI PHU PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus					
SK11	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	%	75,71	85,33		
	1 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbiasa dan terawasi					
	2 Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbiasa dan terawasi	%	100	100		
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri				56.334.000	
SK12	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	%	5,26	10,53		
	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan					
	2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0,68	0,74		
SK13	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	%	50,00	68,00		
	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan					
	2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	100	100		
2148	Pembinaan Haji				3.068.750	
SK14	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	%	26,00	26,00		
	1 Persentase petugas haji yang profesional					

Bidang PHU/ Sei PHU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
					2020	
	2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	98,85	100		
	3 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	%	100	100		
	4 Jumlah advokasi haji yang terselesaikan	Kali	20	20		
	5 Persentase pembinaan haji yang bersertifikat	%	92,00	100		
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu				-	
SK15	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	%	99,31	100		
SK16	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	%	100	100		
2150	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PHU				14.472.579	
SK17	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	%	100	100		
	2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	96,68	90,00		
III	PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM				1.239.420.344	BIDANG PENMAD/ PIDANG PAKIS/ SEI PENMAD/ SEI PAI DAN PONTRENS/ SEI PAKIS/ SEI PENDIS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/ KOTA/ KEPALA MADRASAH NEGERI
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam				153.718.719	
SK18	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	%	47,00	50,00		Bidang Pakis/ Se Pakis/ Sei PAI dan Pontren/ Sei Pakis Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
	2 Persentase GPAI di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	20,00		
	3 Persentase PPAI di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	10,00		



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
2020							
SK19	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase GPAI yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,00	55,00	2020	
SK20	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase GPAI pada sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46,5	47,78		
SK21	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase GPAI yang mengikuti PPG	%	65,00	70,00		
		2 Persentase GPAI berkualifikasi minimal S1	%	77,50	78,00		
SK22	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	1 Persentase GPAI yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam Pendidikan Agama pendidikan agama	%	NA	40,00		
		2 Persentase PPAI yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam Pendidikan Agama	%	NA	20,00		
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam					6.330,100	
SK23	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al-Quran	%	2,00	3,00		
SK24	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	15,00		
		2 Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	15,00		
		3 Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	NA		
SK25	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/muadalah	Santri	4297	3190		
		2 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	24,00	17,00		
		3 Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah	%	24,00	35,00		



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
						2020	
2129	Peningkatan Mutu dan Relevansi Madrasah					217.401.154	
SK26	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	60,00	60,00		
		2 Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	78,94	80,00		
		3 Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	72,29	75,00		
		4 Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	78,32	80,00		
		5 Persentase madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	1,90	1,90		
SK27	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah Siswa Madrasah Penerima BOS	Orang	147.866	155.190		
		2 Jumlah Siswa Madrasah Penerima PIP	%	25,32	25,00		
SK28	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatan mutunya melalui BOP	Orang	14.082	14.510		
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah					286.776.455	
SK29	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase Siswa Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	50,00		
		2 Persentase Guru Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	4,00	14,50		
		3 Persentase Pengawas Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	6,00	9,28		
SK30	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru pada madrasah yang lulus sertifikasi	%	43,11	NA		
		2 Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	8,00	14,67		
		3 Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0,20	0,51		

Bidang Penmad/ Sei Penmad/ Sei Pendis
pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota/ Kepala MAN/ MTsN /
Kepala MIN



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
					2020	
	4 Persentase Guru Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0.02	0.04		
SK31	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan					
	1 Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46.50	47.78		
	2 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah Tingkat Nasional	Orang	13	20		
SK32	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik					
	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	%	2.00	2.00		
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam					
					575.193.916	
SK33	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pendidikan Islam					Bidang Pknmad/ Bidang Pakis/ Sei Pknmad/ Sei Pknis/ Sei Pakis/ Sei PAI dan Pontren/ Sei Pakis/ Kepala MAIN/ MTsN / Kepala MIN
	1 Persentase keseluruhan muatan Renja dengan Rensira	%	NA	90.00		
	2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	90.00	92.50		
IV	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM					BIDANG URAIS BINSYARI/ BIDANG PENALIS ZAWAJ/ SEI URAIS BINSYARI/ SEI BIMAS ISLAM/ SEI PENALIS ZAWAJ/ PENYELENGGARA ZAWAJ PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/ KOTA
					186.165.917	
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah					
					30.546.800	
SK34	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk					
	1 Jumlah KUA yang ditingkatkan mutunya (direvitalisasi)	Lembaga	4	13		
	2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Lembaga	73	15		
	3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Pasang	1.800	2.000		
	4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Orang	1.040	1.080		
	5 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	Buku	45.000	60.000		
						Bidang Uraisi Binsyari/ Sei Uraisi Binsyari/ Sei Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN	
							2020		
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf							495.000	Bidang Panais Zawa/ Sei Penais Zawa/ Penyelenggara Zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
SK35	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah	%	70,00	70,00			
		2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	%	NA	10,00			
		3	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	70	70,00			
SK36	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	40	40,00			
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	45	45,00			
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam							14.382.910	
SK37	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam	1	Nilai kinerja penyuluh agama Islam	Nilai	80	80			
		2	Persentase penyuluh agama Islam yang dibina	%	60,00	60,00			
		3	Jumlah penyalir agama yang dibina kompetensi	Orang	40	40			
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Islam yang diberdayakan	Kelompok	40	40			
SK38	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Islam	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	20,00	NA			
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kali	1	1			
SK39	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Islam	Persentase Penyuluh Agama Islam yang berwawasan moderat		%	30,00	30,00			
SK40	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Islam sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Agama Islam yang dibina		%	NA	10			
SK41	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Islam di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Islam yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Siaran	1	1			
SK42	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (wisata religi, situs, artefak)		Produk	1	2			



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
						2020	
SK43	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan Islam dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Kegiatan	2	2		Bidang Urals Binsyar/ Sei Urals Binsyar/ Sei Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah					449.250	
SK44	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	30	5		
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Bh	460	360		
		3 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Bh	39	45		
2125	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam					140.291.957	
SK45	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Islam	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	90,00	95,00		
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	90	90,00		
V	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN					4.684.721	
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen					198.000	
SK46	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	%	100	100		
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen					437.000	
SK47	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Kristen	1 Nilai kinerja penyuluhan agama Kristen	Nilai	90	90		
		2 Persentase penyuluhan agama Kristen yang dibina	%	90,00	90,00		
		3 Jumlah penyalir agama yang dibina kompetensi	Kali	40	40		
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluhan agama Kristen yang diberdayakan	Kelompok	100	100		
SK48	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluhan Agama Kristen	Persentase Penyuluhan Agama Kristen yang berwawasan moderat	%	100	100		



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PEWANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
					2020		
SK49	Meningkatnya pengelolaan Rumah ibadah Agama Kristen sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Kristen yang dibina	%	40,00	40,00		
SK50	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga kristiani	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Keluarga	90	90		
2138	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen					1.038.882	
SK51	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Kristen	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Rensira	%	93,00	95,00		
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	99,80	100		
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen					3.010.839	
SK52	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Kristen	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3		BIMAS / SEI BIMAS KATOLIK
VI	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK					3.312.534	
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik					564.407	
SK53	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100		Bimmas Katolik/ Sei Bimas Katolik
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik					687.000	
SK54	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik	1 Nilai kinerja penyuluhan agama Katolik	Nilai	80	85		
		2 Persentase penyuluhan agama Katolik yang dibina	%	60,00	46,00		
		3 Jumlah penyalur agama yang dibina kompetensi	Orang	60	20		
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluhan agama Kristen yang diberdayakan	Kelompok	6	6		
SK55	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluhan Agama Katolik	Persentase Penyuluhan Agama Katolik yang berwawasan moderat	%	80,00	90,00		
SK56	Meningkatnya pengelolaan Rumah ibadah Agama Katolik sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Katolik yang dibina	%	30,00	30,00		



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
							2020	
SK57	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Katolik di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Katolik yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Kali	24	24		
SK58	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bagian		Keluarga	50	50		
SK59	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan Katolik	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	8	11		
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik						505.347	
SK60	Terpenuhinya jumlah Guru Agama Katolik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase Guru Agama Katolik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	60,00	60,00		
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik						896.835	
SK61	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Katolik	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90,00	90,00		
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	100	100		
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik						1.164.292	
SK62	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Katolik	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	3	3		
VII	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU						764.410	BIMAS HINDU
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu						30.000	
SK63	Menghantarkan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Ulama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	100	100		
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu						36.000	
SK64	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu	1 Nilai kinerja penyuluhan agama Hindu		Nilai	70	74		Bimas Hindu
		2 Persentase penyuluhan agama Hindu yang dibina		%	100	100		
		3 Jumlah penyalir agama Hindu yang dibina kompetensi		Orang	NA	NA		



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PEMANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
				2020		
	4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Hindu yang diberdayakan	Kelompok	2	3		
SK65	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Hindu	%	75	78		
SK66	Meningkatnya pengelolaan Rumah ibadah Agama Hindu sebagai pusat syiar agama yang toleran	%	100	100		
SK67	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Hindu di ruang publik	Kali	1	1		
SK68	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Keluarga	20	20		
SK69	Meningkatnya pemberdayaan lembaga darma dana	Lembaga	1	1		Bimas Hindu
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu				40.000	
SK70	Terperuhnya Jumlah Guru Agama Hindu dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	%	80,00	80,00		
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu				616.410	
SK71	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Hindu	%	65,00	70,00		
		%	86,00	88,00		
5104	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu				82.000	
SK72	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Hindu	Dokumen	3	3		
VIII	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA				1.431.856	BIMAS BUDDHA
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha				230.000	
SK73	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	%	60,00	65,00		Bimas Buddha



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
						2020		
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha						630.560	
SK74	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha	1 Nilai Kinerja Penyuluh Agama Buddha	Nilai		95	95		
		2 Persentase Penyuluh agama Buddha yang dibina	%		100	100		
		3 Jumlah penyuluh Agama Buddha yang dibina kompetensi	Orang		5	5		
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluhan agama Buddha yang diberdayakan	Kelompok		2	2		
SK75	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Buddha	Persentase Penyuluh Agama Buddha yang berwawasan moderat	%		100	100		
SK76	Meningkatnya pengelolaan Rumah ibadah Agama Buddha sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Buddha yang dibina	%		100	100		
SK77	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Buddha di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Buddha yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kali		1	1		
SK78	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukarya	Keluarga		25	27		Bimas Buddha
SK79	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitha	Jumlah lembaga dana paramitha yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga		1	1		
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha							
SK80	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%		90,00	90,00		
2146	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha						81.800	
SK81	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Buddha	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%		90,00	90,00		
		2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%		98,9	99,3		
5101	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha						571.296	
SK82	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Buddha	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen		3	3		



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET KINERJA	ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)	2020	PEMANUNG JAWAB PELAKSANAAN
IX		PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA					655.652		BAGIAN / SUBAG TU KANWIL/ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/ KOTA
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama						1.079.131		
SK83	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100	100			Bagian Tata Usaha/ Subag Orjala dan KUB/ Subag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	2.200	2.380			
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	4	5			



Lampiran II : Matrik Kinerja dan Pendanaan 4 Program

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 428A TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT														
I DUKUNGAN MANAJEMEN														
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN														
2098	SK1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase produk hukum yang diberikan	%	80	85	87	90	92				
			2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	54,55	81,82	81,82	90,91	100				
			2	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	3	4				60.500
Pembinaan Administrasi Kepegawaian														
2099	SK2	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00		350.720	350.720	350.720
			2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	80,00	93,00	95,00	97,00	100				
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN														
2100	SK3	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran dan aset BMN	1	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	98,36	98,42	98,47	98,50	98,51		58.001.000	63.801.100	70.181.210
			2	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Laporan	510	510	510	510	510				
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tatakelasna														
2101	SK4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penguatan manajemen organisasi	1	Persentase satuan organisasi/ kerja yang mendapat penilaian dan mengevaluasi standar	%	20,00	60,00	80,00	100	100		150.000	160.000	195.000



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		operasional prosedur berdasar kan peta proses bisnis										
		2 Persentase laporan kinerja satuan kerja yang dievaluasi	%	80,00	100	100	100	100				
		3 Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya	Bh	16	20	20	20	20				
		4 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	80	85	90	95				
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan								527.470	580.217	638.239	702.063
SK5	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Renstra	1 Persentase kesesuaian perencanaan program dan anggaran pusat dan daerah sesuai Renstra	%	90,00	93,00	95,00	95,00	100				
		2 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	Dokumen	312	312	312	312	312				
		1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	92,26	94,00	95,00	96,00	96,00				
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70,00	70,00	75,00	75,00	80,00				
2103	Pembinaan Administrasi Umum								16.293.967	17.923.363	19.715.700	21.687.270
SK7	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	99,14	99,25	99,30	99,35	99,40				
		1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	99,00	99,20	99,30	99,35	99,45				
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	99,15	99,30	99,35	99,40	99,50				
SK8	Meningkatnya kualitas pengelolaan tala persuratan, arsip dan layanan pengedaran barang jasa											



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp.000)			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2105	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan	3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	98,20	99,46	99,55	99,75				
		4	Persentase menurunnya telang gagal	%	95,00	96,45	97,55	98,60				
		5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	96,04	96,30	96,45	96,95				
									36.250	39.875	43.863	48.249
SK9	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Berita	310	315	320	325				
		2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian yang di counter	%	99,10	99,36	99,45	99,50				
			Persentase data agama dan pendidikan yang kompre hensif, valid dan reliabel	%	98,1	98,25	98,36	98,45				
SK10	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi											
2150	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PHU								15.919.837	14.472.580	15.919.838	14.472.581
SK11	Meningkatnya kualitas kinerja	1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	90,00	94,00	96,00	98,00				
		2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	96,68	97,50	98,00	98,50				
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam								632.713.308	695.984.638	765.583.102	842.141.412
SK12	Meningkatnya kualitas kinerja Pendidikan Islam	1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	NA	92,00	93,00	95,00				
		2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	90,00	95,00	96,00	97,00				
2125	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam								154.321.153	169.753.268	186.728.595	205.401.454
SK13	Meningkatnya kualitas kinerja Bimas Islam	1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	91,00	95,00	96,00	99,00				
		2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	90,00	95,00	96,00	97,00				



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SATUAN		BASELINE 2019		TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp. 000)			
								2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2138	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Kristen	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	100	100	100	100	100	100	100	1.142.770	1.257.047	1.382.752	1.521.027
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Kristen	2 Persentase penyusunan anggaran dan pencapaian output belanja	%	98,80	100	100	100	100	100	100	3.311.923	3.643.115	4.007.427	4.408.169
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Katolik	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	986.519	1.085.170	1.193.687	1.313.056
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Katolik	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.280.721	1.408.783	1.549.673	1.704.640
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Hindu	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	678.051	745.856	820.442	902.486
5104	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan Hindu	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	65,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90.200	99.220	109.142	120.056
2146	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Buddha	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	81.800	88.980	96.978	108.376
SK20	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Buddha	1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	81.800	88.980	96.978	108.376
SK20	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Bimas Buddha	2 Persentase penyusunan anggaran dan pencapaian output	%	98,90	99,80	99,90	100	100	100	100	81.800	88.980	96.978	108.376



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)							
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
5101	SK21	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	Belanja															
				Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	3	3	3	3	3	628.426	691.268	760.395		836.434			
II PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA																		
5620	SK22	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama																
				1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100								
				2 Jumlah aktor kerukunan dbina	Orang	2.200	2.580	2.800	3.200	3.500								
		3 Jumlah desa sadar kerukunan dbina	Lokasi	4	7	8	9	10										
2104	SK23	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah																
				1 Jumlah KUA yang ditingkatkan mutunya (direvitalisasi)	Lembaga	4	6	10	11	12							44.723.570	
				2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Lembaga	73	19	21	22	23								
				3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Pasang	1.800	2.100	2.205	2.315	2.430								
				4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Orang	1.040	1.188	1.306	1.436	1.579								
				5 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	Buku	45.000	48.400	53.240	55.902	58.902								
2122	SK24	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf																
				1 Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah	%	70,00	70,00	75,00	80,00	90,00								
				2 Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	%	NA	20,00	30,00	40,00	50,00								
										544.500		598.950		658.845		724.730		



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp.000)			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK25	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	3	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	70,00	70,00	70,00	80,00	90,00				
		1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	40,00	50,00	55,00	65,00	75,00				
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	45,00	50,00	55,00	65,00	75,00				
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam												
SK26	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam	1	Nilai Kinerja penyuluh agama Islam	Nilai	80	82	83	84	85				
		2	Persentase penyuluh agama Islam yang dibina	%	60,00	70,00	70,00	80,00	100				
		3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	40	40	50	65	80				
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Islam yang diberdayakan	Kelompok	40	40	40	40	40				
SK27	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Islam	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial, keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	20,00	20,00	40,00	50,00	60,00				
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kali	1	1	1	2	2				
SK28	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Islam	Persentase Penyuluh Agama Islam yang berwawasan moderat		%	30,00	40,00	50,00	75,00	85,00				
SK29	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Islam sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Agama Islam yang dibina		%	NA	10	20	30	50				
SK30	Meningkatnya kegiatan Penyiaran Agama Islam di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan Islam yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Siaran	1	1	1	1	1				
SK31	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (wisata religi, situs, artefak)		Produk	1	2	2	2	2				
SK32	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan Islam dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan		Kegiatan	2	2	2	2	2				



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN					ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
				2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
2124 SK33	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	sikap toleran (hari besar keagamaan)										
	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	30	7	9	11	13		494.175	543.593	597.952	657.747
	2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Bh	460	720	780	940	980					
	3 Jumlah majelis/mushalla yang terasifikasi pengukuran arah kiblat	Bh	39	50	55	60	65					
2137 SK34	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen								480.700	528.770	581.647	639.812
	1 Nilai kinerja penyuluh agama Kristen	Nilai	90	90	90	90	90					
	2 Persentase penyuluh agama Kristen yang dibina	%	90,00	90,00	90,00	90,00	100					
	3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Kali	40	40	40	40	40					
SK35	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga											
	4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Kristen yang diberdayakan	Kelompok	100	100	100	100	100					
	Persentase Kristen Agama yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100					
	Persentase pengelola rumah ibadah Kristen yang toleran	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00					
SK36	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga											
	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Keluarga	90	90	90	90	90					
	Persentase Kristen Agama yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100					
	Persentase pengelola rumah ibadah Kristen yang toleran	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00					
2140 SK38	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik								755.700	831.270	914.397	1.005.837
	1 Nilai kinerja penyuluh agama Katolik	Nilai	80	85	90	90	90					
	2 Persentase penyuluh agama Katolik yang dibina	%	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
	3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	60	40	45	50	60					



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
			4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Kristen yang diberdayakan	Kelompok	6	8	8	9	10				
SK39	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Katolik		Persentase Penyuluh Agama Katolik yang berkegiatan moderat	%	80,00	95,00	95,00	100	100				
SK40	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Katolik sebagai pusat syiar agama yang toleran		Persentase pengelola rumah ibadah Katolik yang dibina	%	30,00	40,00	60,00	70,00	80,00				
SK41	Meningkatnya kegiatan Penyuluhan Agama Katolik di ruang publik		Jumlah siaran keagamaan Katolik yang berkegiatan moderat di media massa dan ruang publik	Kali	24	48	48	48	48				
SK42	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga		Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bagian	Keluarga	50	50	60	60	80				
SK43	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan Katolik		Jumlah lembaga keagamaan Katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	8	12	12	12	12				
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu						39.600	43.560	47.916				52.708
SK44	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Hindu		1 Nilai kinerja penyuluh agama Hindu	Nilai	70	78	83	87	90				
			2 Persentase penyuluh agama Hindu yang dibina	%	100	100	100	100	100				
			3 Jumlah penyuluhan agama Hindu yang dibina kompetensi	Orang	NA	NA	NA	NA	NA				
			4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama Hindu yang diberdayakan	Kelompok	2	3	3	3	3				
SK45	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Hindu		Persentase Penyuluh Agama Hindu yang berkegiatan moderat	%	75,00	83,00	87,00	92,00	95,00				
SK46	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Hindu sebagai pusat syiar agama yang toleran		Persentase pengelola rumah ibadah Hindu yang dibina	%	100	100	100	100	100				
SK47	Meningkatnya kegiatan Penyuluhan Agama Hindu di ruang publik		Jumlah siaran keagamaan Hindu yang berkegiatan moderat di media massa dan ruang publik	Kali	1	1	1	1	1				
SK48	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga		Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga	Keluarga	20	20	20	20	20				



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK49	Meningkatnya pemberdayaan lembaga agama dalam pembinaan keagamaan	Jumlah lembaga agama yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1				
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha												
SK50	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Buddha	1 Nilai Kinerja Penyuluh Agama Buddha	Nilai	95	96	97	98	99					
		2 Persentase Penyuluh agama Buddha yang dibina	%	100	100	100	100	100					
		3 Jumlah penyalir Agama Buddha yang dibina kompetensi	Orang	5	5	5	5	5					
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluhan agama Buddha yang diberdayakan	Kelompok	2	2	2	2	2					
SK51	Meningkatnya kualitas moderasi beragama Penyuluh Agama Buddha	Persentase Penyuluh Agama Buddha yang berwawasan moderat	%	100	100	100	100	100					
SK52	Meningkatnya pengelolaan Rumah Ibadah Agama Buddha sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase pengelola rumah ibadah Buddha yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	%	100	100	100	100	100					
SK53	Meningkatnya kegiatan Penyuluhan Agama Buddha di ruang publik	Jumlah aliran keagamaan Buddha yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kali	1	1	1	1	1					
SK54	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhtaya	Keluarga	25	32	40	43	43					
SK55	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana paramitna	Jumlah lembaga dana yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	1	1	1	1	1					
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus												
SK56	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	75,71	100	100	100	100	100				
		2 Persentase Penyelenggaraan ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100				
										60.680	66.746	73.423	80.765



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)				
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri												
SK57	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	5,26	10,53	31,58	63,18	100	100.555.359	112.216.967	18.081.092	21.049.809
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberengalkan pada tahun bersangkutan	%	0,68	0,74	0,74	0,74	0,74				
SK58	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	33,12	72,67	100	100	100				
		2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100				
2148	Pembinaan Haji												
SK59	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang profesional	%	100	100	100	100	100	3.375.825	3.713.188	4.084.506	4.492.987
		2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	98,85	100	100	100	100				
		3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100				
		4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara	Kali	20	20	20	20	20				
		5	Persentase pembinaan haji yang bersertifikat	%	92,00	100	100	100	100				
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu												
SK60	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	Persentase realisasi pelaksanaan operasional haji	%	99,31	100	100	100	100	1.337.254	1.470.979	1.618.077	1.779.884	
SK61	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	%	100	100	100	100	100					
III	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN												
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam												
SK62	Menguatnya mutu/moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama	1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama	%	47,00	55,00	60,00	70,00	75,00	485.090.038	533.595.042	586.956.566	645.650.599
										189.090.591	185.999.650	204.599.615	225.059.576



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		2 Persentase GPAl di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	25,00	30,00	35,00	40,00				
		3 Persentase PPAl di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	20,00	30,00	40,00	50,00				
		Persentase GPAl yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,00	57,00	60,00	65,00	70,00				
SK63	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase GPAl pada sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46,50	48,53	49,28	50,03	50,78				
SK65	Meningkatnya kualitas pendidikan guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase yang mengikuti PPG	%	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00				
		2 Persentase GPAl berkualifikasi minimal S1	%	77,50	80,00	81,00	82,00	85,00				
SK66	Meningkatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	1 Persentase GPAl yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam Pendidikan Agama	%	NA	47,00	49,00	50,00	52,00				
		2 Persentase PPAl yang dibina dalam menaupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam Pendidikan Agama	%	NA	25,00	27,00	29,00	31,00				
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah								315.454.101	346.999.511	381.699.462	419.869.408
SK67	Meningkatnya mutu moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase Siswa Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	70,00	80,00	90,00	100				
		2 Persentase Guru Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	4,00	14,50	14,50	14,50	14,50				
		3 Persentase Pengawas Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	6,00	20,10	20,84	21,85	28,14				



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK68	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru pada madrasah yang lulus sertifikasi	%	43,11	44,82	47,67	51,1	55,1				
		2 Persentase tenaga kependidikan madrasah memperoleh peningkatan kompetensi	%	8,00	17,65	18,31	19,01	24,71				
		3 Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0,20	9,30	9,30	9,30	9,30				
		4 Persentase Guru Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0,02	12,23	12,23	12,23	12,23				
SK69	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai penetapan tunjangan	%	46,50	48,53	49,26	50,03	50,78				
		2 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah Tingkat Nasional	Orang	13	26	32	40	43				
SK70	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	%	2,12	3,00	5,00	6,00	7,00				
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik								505.347	595.881	611.489	675.615
SK71	Terperuhnya jumlah Guru Agama Katolik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase Guru Agama Katolik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00				
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu								40.000	40.000	46.000	46.000
SK72	Terperuhnya jumlah Guru Agama Hindu dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase Guru Agama Hindu yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha											
SK73	Terperuhnya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru pendidikan agama Buddha yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00				



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
IV PROGRAM PAUD DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN												
2128	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam											
SK74	Menguatkan peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama	Persentase peningkatan pada pendidikan diniyah keaffiliyah dan pendidikan Al-Quran	%	2,00	3,50	4,00	4,50	5,00				
		1 Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	20,00	25,00	30,00	40,00				
		2 Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	20,00	25,00	30,00	35,00				
SK75	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	3 Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	2,00	5,00	7,00	10,00				
		1 Jumlah siswa penerima BOS pada pendidikan diniyah/ muadalah	Santri	4.297	4.400	4.600	4.700	4.800				
		2 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	24,00	24,00	27,00	28,00	30,00				
SK76	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	3 Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan diniyah/muadalah	%	24,00	37,00	38,00	39,00	40,00				
2129	Peningkatan Mutu dan Relevansi Madrasah											
SK77	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	60,00	61,00	62,00	63,00	65,00				
		2 Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	78,94	81,00	82,50	83,50	85,00				
		3 Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	72,29	76,00	77,00	78,00	80,00				
		4 Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	78,32	81,00	82,50	83,50	85,00				
		5 Persentase madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30				
SK78	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah Siswa Madrasah Penelima BOS	Orang	147.866	159.846	164.840	171.224	179.784				
									239.141.269	263.055.396	289.380.936	318.297.030



PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TAHUN				ALOKASI PENDANAAN (Rp 000)			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK79	Menguatnya Prasekolah	2 Jumlah Ibadah Penerima PIP	%	25,32	24,00	23,00	22,00	22,00				
		Jumlah siswa RA yang tingkalkan mulanya melalui BOP	Orang	14.082	14.945	15.393	16.008	16.808				
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen											
SK80	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	%	100	100	100	100	100	167.476	184.114	202.524	222.652
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik											
SK81	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	547.712	602.412	652.662	728.917
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu											
SK82	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100	100	100	60.000	60.000	60.000	60.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha											
SK83	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	693.616	762.976	839.275	923.203



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 424 TAHUN 2020**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024, perlu dilaksanakan penyusunan Renstra pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2020-2024;
- b. bahwa penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk memberikan panduan bagi Satuan Kerja di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota sebagai dasar Perencanaan, Pengendalian Program dan Anggaran dalam kurun waktu 2020-2024;
- c. bahwa nama dan jabatannya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan dan Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024 serta Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT 2020-2024
NOMOR **424** TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT 2020-2024

Penanggungjawab : H. Hendri, S.Ag, M.Pd
Ketua : H. Irwan, M.Ag
Sekretaris : H. Tan Gusli, S.Fil.I, M.AP, MA

1. Bidang Urusan Agama Islam

- Koordinator : H. Edison, M.Ag
- Anggota : 1) H. Yufrizal, S.Ag, M.HI
: 2) Januar, S.H

2. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

- Koordinator : H. Edison, M.Ag
- Anggota : 1) Dr. Muslimah, S.Th.I, M.Ag
: 2) H. Alfajri, S.HI, M.A

3. Bidang Pendidikan Madrasah

- Koordinator : Drs. H. Syamsul Arifin, M.Pd
- Anggota : 1) H. Afrizal, S.Pd.I, M.Si
: 2) Fauqa Nuri Ichsan, M.Pd

4. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

- Koordinator : H. Rinalfi, S.Ag, S.H, M.M
- Anggota : 1) Efrian, S.Kom
: 2) Solmus, S.Th.I

5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Koordinator : H. Joben, S.Ag, M.A
- Anggota : 1) H. Hidayat DS, S.Ag
: 2) H. Hami Mulyawan, S.HI, M.M

6. Pembimbing Masyarakat Kristen

- Koordinator : Yesri Elfis Hasugian, S.Th
- Anggota : Roslina Situmorang

7. Pembimbing Masyarakat Katolik

- Koordinator : Hendrikus Jomi, S.Ag
- Anggota : Fajar Cahyono, S.S

8. Pembimbing Masyarakat Hindu

- Koordinator : Jumadi, S.Ag, M.Psi
- Anggota : Warsito, A.Md

9. Pembimbing Masyarakat Buddha

- Koordinator : Muryadi Eko Priyanto, SE, M.M
- Anggota : Dwi Supriono, M.Kom

10. Sekretariat

- Koordinator : Mulyono, S.E
- Anggota :
 - 1) Yumari, S.H
 - 2) Amrizal, S.E
 - 3) Khairulmen, S.Sos
 - 4) H. Syahirul Alim, S.Sos
 - 5) Yosherman, S.E, Akt
 - 6) Malvi Asra Vansuri, S.E
 - 7) Wise Harumi, SP, S.HI
 - 8) Loly Volia, S.T
 - 9) Widya Asrika, S.Kom, M.Si
 - 10) Hj. Helmiyetti, S.Sos
 - 11) Varia Gusma Pratiwi, S.E
 - 12) Dini Mahdumillah, S.IP
 - 13) Taufik Hismar



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**